

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Gambaran Umum Subjek Penelitian**

Bagian ini akan memberikan gambaran singkat mengenai Bisnis.com dan Detik.com, dua sumber berita online Indonesia yang penting untuk penelitian ini.

#### **4.1.1. Profil Perusahaan Bisnis.com**



Gambar 4.1. Logo Bisnis.com (*Website Bisni.com, 2024*)

Harian Bisnis Indonesia, bagian dari Grup Media Bisnis Indonesia (BIG Media), adalah sumber berita wawasan pasar, keuangan, dan data berkenaan industri terkemuka di Indonesia. Bisnis.com merupakan edisi online Bisnis Indonesia. Politik, perekonomian Indonesia, dan berita dunia semuanya diliput oleh Bisnis.com. Bisnis Indonesia diluncurkan pertama kali di Jakarta di 14 Desember 1985 dengan slogan “Navigasi Bisnis Terpercaya”. Media Bisnis.com diterbitkan oleh PT Jurnalindo Aksara Grafika, yang dimiliki oleh 4 (empat) pengusaha Ciputra, Anthony Salim, Sukamdani Sahid Gitosardjono, dan Eric Samola. Seperti halnya koran Bisnis Indonesia, informasi yang disajikan media Bisnis.com berhubungan dengan bisnis, ekonomi, finansial, market, teknologi, travel, informasi umum (kabar24), lifestyle, entrepreneur, sport, sepak bola dan otomotif guna bisa dibuat sebagai navigator handal bagi pebisnis.

Slogan “Navigasi Bisnis Terpercaya” oleh Bisnis.com diartikan portal berita digital yang dimiliki oleh Bisnis Indonesia Group dan berfungsi untuk dapat mencukupi keperluan informasi bisnis dan ekonomi. Melalui konsep tersebut, portal Bisnis.com telah mengadakan konten yang sesuai dengan segmen pembaca yang sangat luas guna memenuhi kebutuhan pembaca, terutama para pelaku bisnis

yang membutuhkan atau mengikuti berita bisnis kapan saja dan dimana saja. Sebab itu, Bisnis Indonesia mengikuti pertumbuhan ekonomi Indonesia terkait informasi bisnis dan ekonomi yang diperlukan oleh dunia usaha guna membantu berjalannya bisnis dan ekonomi.

Bisnis.com punya visi dan misi, yaitu jadi lembaga multimedia atau media informasi yang terpercaya guna mencerdaskan bangsa. Sedangkan misinya yaitu, memaksimalkan usaha multimedia, memberdayakan SDA lebih optimal, mempertahankan dan menjaga kredibilitas usaha yang sehat, memberikan manfaat untuk lingkungan dunia usaha, serta dapat menghasilkan keuntungan yang wajar.

#### 4.1.2. Profil Perusahaan Detik.com



Gambar 4. 2. Logo detik.com (*Website detik.com, 2024*)

Saat ini, detik.com telah berkembang menjadi portal untuk seluruh layanan dalam ekosistem CT Corp, dan terus menjadi situs berita digital yang paling banyak digunakan di Indonesia, menyajikan informasi gaya hidup dan acara melalui kaca mata berita terkini. Portal berita yang dibangun oleh Budiono Darsono (pensiunan jurnalis majalah Tempo dan tabloid Detik), Didi Nugrahadi, Abdul Rahman (pensiunan jurnalis SMA), Yayan Sopyan (pensiunan jurnalis tabloid detik) pada 9 Juli 1998. Detikcom dibangun dengan ide awal menghadirkan berita terkini secara berkesinambungan dan berkelanjutan (Detik.com, 2017).

Berikutnya, detik.com memiliki berbagai macam rubrik yaitu detiknews, sepakbola, detiksport, detikoto, detikhot, detikfinance, detikfood, detikhealth, dan detiknet guna memudahkan pembaca mencari segala informasi sesuai kebutuhan dan keinginan khalayak. Melalui bermacam rubrik yang tersediam detik.com Berusaha untuk mengadakan sebuah platform yang efisien dijangkau oleh pembaca guna membuat berita terkini yang sedang tren atau viral. Berbagai platform atau

rubrik tersebut pastinya memiliki berbagai informasi yang berbeda satu sama lainnya.

Maksud dan tujuan Detik.com adalah menjadi “*digital life gateway*” bagi media massa yang menawarkan informasi yang cepat, akurat, dan layanan terpadu. Pada saat yang sama, misinya ialah “*Fastest, Trusted & Independent*” bertujuan untuk menyampaikan data yang akurat, bisa diandalkan, dan cepat dengan tetap mengedepankan independensi dan keseimbangan. Hal ini juga bertujuan untuk menyampaikan berita secara informatif, lugas, dan menarik, dengan beragam konten yang disajikan secara lengkap. Terakhir, perusahaan ini bercita-cita menjadi pemimpin dalam bidang pengukuran dalam hal teknologi.

## 4.2. Hasil dan Analisa Penelitian

### 4.2.1. Analisa Framing Berita Bisnis.com

#### 1. Analisis Artikel Berita 1

**Judul** : Hotman Paris Ogah Investasi di RI Imbas Pajak Hiburan, Menparekraf Tanggapi Begini

**Sumber** : Bisnis.com

**Tanggal** : 22 Januari 2024

**Ringkasan** : Rencana pemilik Atlas Beach Fest sekaligus pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea untuk ‘kabur’ dari Indonesia terkait tingginya pajak hiburan mendapat respons dari Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf). Sandiaga juga mengapresiasi investasi seorang Hotman Paris sebab menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan peluang usaha di Indonesia. Pemerintah meyakinkan dan berupaya agar para investor tetap menanamkan modalnya di Indonesia dengan terus melakukan komunikasi bersama investor atau pelaku usaha. Namun, Hotman Paris tetap merasa keberatan selaku pelaku usaha dengan adanya kebijakan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yakni jasa hiburan di kisaran 40%-75%.

Tabel 4.1. Analisis Artikel Berita 1

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Hotman Paris Ogah Investasi di RI Imbas Pajak Hiburan, Menparekraf Tanggapi Begini
	<b>Lead</b>	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, memberikan tanggapan terhadap rencana pengacara terkenal dan pemilik Atlas Beach Fest, Hotman Paris Hutapea, yang ingin meninggalkan Indonesia karena dampak dari kenaikan pajak hiburan.
	<b>Latar Informasi</b>	Protes Hotman Paris dengan adanya kenaikan pajak hiburan menimbulkan tanggapan dari Menparekraf Sandiaga Uno.
Struktur Skrip	<b>Kutipan Sumber</b>	Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) 1. "Pengaturan pajak ini tidak hanya mengenai pendapatan negara, tetapi juga tentang regulasi, ketaatan, dan upaya untuk mengarahkan pembangunan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045"  Hotman Paris (pelaku usaha sektor hiburan)
	<b>Pernyataan Opini</b>	1. Hotman menyatakan, bahwa mereka sedang memperluas bisnis mereka ke beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, dan Dubai. Sebagai gantinya, daripada fokus di Indonesia, Hotman tahun ini akan memprioritaskan untuk membuka usaha di negara-negara tersebut. 2. "Oleh karena itu, kami berencana untuk meninggalkan Indonesia. Kami akan membuka cabang di dekat Menara Kembar di Malaysia, di Bangkok, dan seluruh pendapatan kami akan dialihkan ke Dubai. Selamat tinggal Indonesia". 1. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta memberikan penghargaan atas investasi yang dilakukan oleh Hotman karena membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Namun, dia menekankan bahwa di Indonesia, pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara, melainkan juga sebagai sarana untuk meningkatkan pembangunan.
	<b>Penutup</b>	Artikel ini ditutup dengan pernyataan dari Hotman Paris selaku pengacara sekaligus pelaku industri hiburan.
Struktur Tematik	<b>What</b>	Imbas kenaikan pajak hiburan terhadap Hotman Paris selaku pengusaha hiburan.
	<b>Where</b>	Jakarta
	<b>When</b>	Jumat, 22 Januari 2024
Struktur Retoris	<b>Who</b>	Hotman Paris dan Sandiaga Uno
	<b>Why</b>	Tanggapan dan sikap Hotman Paris yang ingin pindah dari Indonesia memberikan respon dari Sandiaga Uno selaku menparekraf.
	<b>How</b>	Hotman Paris ialah salah satu investor yang cukup berdampak di Indonesia. Maka, Sandiaga Uno selaku Menparekraf merespons hal tersebut agar Hotman Paris tetap berinvestasi di Indonesia dengan cara memberikan kenyamanan dalam hal berinvestasi juga melakukan komunikasi dengan pelaku usaha lainnya.
Struktur Tematik	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Dalam artikel ini tiap paragraf menginformasikan keluhan Hotman Paris terkait kenaikan pajak hiburan yang mendapat respons dari Menparekraf. Kemudian pada artikel ini juga merujuk pada sebuah pasal yang telah ditetapkan terkait tarif PBJT pajak hiburan
	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Pada artikel ini menampilkan foto Sandiaga Uno, foto tersebut menggambarkan Sandiaga Uno selaku Menparekraf sedang melakukan wawancara oleh wartawan di Kantor

---

Kemenparekraf. Selain itu, pemberitaan ini terdapat unsur koheisi yakni kata “Dia” pada artikel tersebut bermaksud menyebutkan Sandiaga Uno dan juga terdapat kata “ogah” dalam judul “Hotman Paris Ogah Investasi di RI Imbas Pajak Hiburan, Menparekraf Tanggapi Begini” menekankan rasa enggan dan protes terhadap adanya kebijakan baru yakni kenaikan pajak hiburan 40%-75%.

---

*Sumber: Olahan Peneliti*

## **Rincian Analisis**

### **a. Struktur Sintaksis**

Berdasarkan struktur sintaksis, wartawan ingin menginformasikan salah satu pengusaha atau investor Indonesia mengeluhkan pajak hiburan yang terlalu tinggi, Hotman membuat rencana untuk membuka bisnisnya di Malaysia, Bangkok, dan Dubai. Artikel ini diberi judul “Hotman Paris Ogah Investasi di RI Imbas Pajak Hiburan, Menparekraf Tanggapi Begini”, selain itu pada artikel tersebut seperti yang disampaikan oleh Menparekraf Sandiaga Uno bahwa pemerintah juga berupaya agar para investor nyaman dan tetap berinvestasi di Indonesia, hal itu selaras dengan *lead* dan latar informasi dalam artikel. Penulis dalam artikel mencantumkan sumber dari pihak terkait, yaitu Sandiaga Uno dan Hotman Paris selaku pelaku usaha yang terdampak. Melalui kutipan sumber, penulis dapat memberikan informasi secara seimbang. Artikel tersebut ditutup dengan kutipan pernyataan dari Hotman Paris yang ingin pindah berinvestasi di luar negeri. Melalui elemen-elemen pada struktur sintaksis, penulis berfokus pada rencana Hotman untuk pindah berinvestasi dan respons dari Menparekraf.

### **b. Struktur Skrip**

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yaitu Imbas kenaikan pajak hiburan terhadap Hotman Paris dan tanggapan Menparekraf. Selanjutnya *where* dan *when* yaitu Jakarta, 22 Januari 2024. Lalu, *who* yaitu Sandiaga Uno dan Hotman Paris, dan *why* yakni tanggapan dan sikap Hotman Paris yang ingin pindah dari Indonesia memberikan respon dari Sandiaga Uno selaku menparekraf. Dan *how* yaitu Hotman Paris ialah salah satu investor yang cukup berdampak di Indonesia dengan cara memberikan kenyamanan dalam hal berinvestasi

juga melakukan komunikasi dengan pelaku usaha lainnya. Maka, Sandiaga Uno selaku Menparekraf merespons hal tersebut agar Hotman Paris tetap berinvestasi di Indonesia. Penulis dalam artikel ini bersifat informasi yang memfokuskan respons Menparekraf dari adanya keluhan salah satu investor yaitu Hotman Paris.

**c. Struktur Tematik**

Berdasarkan struktur tematik dalam artikel secara keseluruhan dari awal paragraf hingga paragraf penutup memiliki keterkaitan bagaimana Hotman Paris menyampaikan keluhan terkait tingginya pajak hiburan, dan solusi yang diberikan oleh Sandiaga Uno selaku Menparekraf. Seperti pernyataan pendapat dari Hotman Paris di awal paragraf yang tidak ingin melanjutkan investasi di luar negeri, dan dilanjut dengan respons dari Sandiaga Uno akibat keluhan dari Hotman yakni tingginya pajak hiburan.

**d. Struktur Retoris**

Berdasarkan struktur retoris, pada artikel ini menampilkan foto Sandiaga Uno, foto tersebut menggambarkan Sandiaga Uno selaku Menparekraf sedang melakukan wawancara oleh wartawan di Kantor Kemenparekraf. Selain itu, pemberitaan ini terdapat unsur kohesi yakni kata “Dia” pada artikel tersebut bermaksud menyebutkan Sandiaga Uno dan juga terdapat kata “ogah” dalam judul “Hotman Paris Ogah Investasi di RI Imbas Pajak Hiburan, Menparekraf Tanggapi Begini” menekankan rasa enggan dan protes terhadap adanya kebijakan baru yakni kenaikan pajak hiburan 40%-75%.

**2. Analisis Artikel Berita 2**

**Judul** : Sandiaga Uno Tanggapi Inul, Minta Tidak Khawatir soal Pajak Hiburan Naik 40-75%

**Sumber** : Bisnis.com

**Tanggal** : 15 Januari 2024

**Ringkasan** : Polemik kenaikan pajak hiburan membuat sejumlah pihak gusar. Kenaikan pajak hiburan yang tinggi ini pun sempat menimbulkan kritik tajam dari beberapa kalangan. Hotman dan Inul kompak menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemerintah menarik pajak hiburan yang dinilai terlalu tinggi.

Tabel 4.2. Analisis Artikel Berita 2

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Sandiaga Uno Tanggapi Inul, Minta Tidak Khawatir soal Pajak Hiburan Naik 40-75%
	<b>Lead</b>	Kontroversi mengenai kenaikan pajak hiburan telah menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan. Tidak hanya pelaku usaha, tetapi juga para selebriti turut menyuarakan pendapat mereka.
	<b>Latar Informasi</b>	Sandiaga Uno menanggapi keluhan Inul Daratista terkait pajak hiburan naik 40-75%.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Hotman Paris (pengacara sekaligus pelaku usaha hiburan) 1. "Apakah ini serius!? Pajak sebesar 40%? Mulai efektif Januari 2024? Sangat tinggi sekali! Apakah ini akan merugikan bisnis kita? Ayo, mari para pelaku usaha bersuara keras!"
	<b>Pernyataan Opini</b>	Sandiaga Uno (Menparekraf) 1. "Para pengusaha tidak perlu cemas. Proses peninjauan yudisial masih berlangsung. Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil bertujuan untuk menggerakkan dan meningkatkan kesejahteraan, bukan untuk menghancurkan usaha." 2. "Semua kebijakan, termasuk yang terkait dengan pajak, akan disesuaikan untuk memperkuat sektor ini, sehingga sektor ini dapat menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja." 3. "Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan tujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Kami meyakinkan bahwa industri ini yang sudah bangkit tidak akan kami hentikan. Terima kasih kepada Mbak @inul.d dan semua yang telah menyampaikan aspirasinya." 1. Pemerintah tidak akan menghentikan perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif karena keduanya sedang mengalami kebangkitan setelah pandemi. Terlebih lagi, saat ini sektor-sektor tersebut berhasil menciptakan 40 juta kesempatan kerja.
Struktur Skrip	<b>Penutup</b>	Pemberitaan ditutup dengan kutipan Sandiaga Uno yang menyatakan pemerintah akan memberikan kesejahteraan kepada pelaku parekraf.
	<b>What</b>	Polemik kenaikan pajak hiburan membuat para pelaku pariwisata mengeluh hingga mendapatkan tanggapan dari Sandiaga Uno.
	<b>Where</b>	Jakarta
	<b>When</b>	15 Januari 2024
	<b>Who</b>	Inul Daratista dan Sandiaga Uno
	<b>Why</b>	Kenaikan pajak hiburan yang sangat tinggi menimbulkan protes dari para pelaku usaha
	<b>How</b>	Adanya protes dari berbagai pihak pelaku usaha membuat Sandiaga Uno menanggapi bahwa tidak perlu khawatir karena

<p><b>Struktur Tematik</b></p>	<p><b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b></p>	<p>pemerintah tidak akan mematikan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dan akan terus berjuang demi kesejahteraan pelaku parekraf.</p> <p>Dari awal hingga akhir paragraf saling berkaitan terkait keluhan pelaku usaha dan tanggapan dari Sandiaga Uno selaku Menparekraf yang memberikan solusi terkait protes salah satu pelaku usaha yaitu Inul Daratista dengan cara pemerintah akan memberikan dan memberdayakan kesejahteraan.</p> <p>Penggunaan foto Sandiaga Uno pada artikel ini yang ditemui di Jakarta, selain itu pada artikel ini juga terdapat foto postingan Instagram official Sandiaga Uno yang berisi gambaran penjelasan konflik yang terjadi atas protes dari Inul Daratista. Selain itu terdapat kata frasa hukum “<i>judicial review</i>” yakni bermaksud Pemeriksaan terhadap keabsahan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi melalui serangkaian prosedur uji konstitusionalitas dan juga terdapat kata “ayok” yang bermakna mengajak atau memberikan dorongan agar para pelaku usaha protes dengan adanya kebijakan baru tersebut.</p>
<p><b>Struktur Retoris</b></p>		

Sumber: Olahan Peneliti

## Rincian Analisis

### a. Struktur Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis dalam artikel berita ini dengan judul “Sandiaga Uno Tanggapi Inul, Minta Tidak Khawatir soal Pajak Hiburan Naik 40-75%” menjelaskan konflik yang terjadi dari berbagai pihak yang bersuara terkait kenaikan pajak hiburan yang sangat tinggi. Hal ini didukung pada bagian lead dan latar informasi yang ditonjolkan oleh penulis yakni kontroversi mengenai kenaikan pajak hiburan telah menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan. Tidak hanya pelaku usaha, tetapi juga para selebriti turut menyuarakan pendapat mereka. Berdasarkan kutipan sumber dari artikel ini, penulis berfokus menyampaikan upaya yang dilakukan oleh Sandiaga Uno dengan menginformasikan kepada pelaku usaha tidak perlu khawatir karena kebijakan tersebut masih pada tahap *judicial review* dan pemerintah akan memastikan serta memberikan kesejahteraan bukan untuk mematikan kegiatan usaha.

### b. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel ini memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yakni Polemik kenaikan pajak hiburan membuat para pelaku pariwisata mengeluh hingga mendapatkan tanggapan dari Sandiaga Uno. Selanjutnya unsur *where* dan *when* dimana terjadi di Jakarta pada 15 Januari 2024, unsur *who* yaitu Inul Daratista dan Sandiaga Uno. Lalu unsur

*why* yakni Kenaikan pajak hiburan yang sangat tinggi menimbulkan protes dari para pelaku usaha dan unsur *how* yaitu Adanya protes dari berbagai pihak pelaku usaha membuat Sandiaga Uno menanggapi bahwa tidak perlu khawatir karena pemerintah tidak akan mematikan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dan akan terus berjuang demi kesejahteraan pelaku parekraf.

**c. Struktur Tematik**

Berdasarkan struktur tematik dalam artikel secara keseluruhan dari awal paragraf hingga paragraf penutup memiliki keterkaitan bagaimana Sandiaga Uno menanggapi protes para pelaku usaha salah satunya yaitu Inul Daratista dengan cara pemerintah akan memberikan dan memberdayakan kesejahteraan. Seperti pernyataan dan tanggapan yang diberikan Sandiaga Uno khususnya kepada pelaku usaha yang keberatan atas adanya kebijakan kenaikan pajak hiburan 40%-75%.

**d. Struktur Retoris**

Berdasarkan struktur retoris, penggunaan foto Sandiaga Uno pada artikel ini yang ditemui di Jakarta, selain itu pada artikel ini juga terdapat foto postingan Instagram official Sandiaga Uno yang berisi gambaran penjelasan konflik yang terjadi atas protes dari Inul Daratista. Selain itu terdapat kata frasa "*judicial review*" yakni bermaksud pemeriksaan terhadap keabsahan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi melalui serangkaian prosedur uji konstitusionalitas dan dan juga terdapat kata "ayok" yang bermakna mengajak atau memberikan dorongan agar para pelaku usaha protes dengan adanya kebijakan baru tersebut.

**3. Analisis Artikel Berita 3**

**Judul** : Kenaikan Pajak Hiburan dan SPA, PHRI : Ojo Kesusu  
**Sumber** : Bisnis.com  
**Tanggal** : 8 Januari 2024

**Ringkasan** : Pelaku bisnis dan pariwisata di Bali menyatakan kekhawatiran atas kenaikan pajak barang dan jasa tertentu hingga 40%, yang dianggap terlalu drastis dan memberatkan bagi pelaku usaha dalam kategori tersebut. I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, mengkritik bahwa kebijakan tersebut kurang tepat dan minim sosialisasi karena menetapkan tarif pajak SPA sebesar 40%, menyamakan dengan pajak hiburan seperti klub malam dan tempat karaoke. PHRI Bali mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kenaikan pajak tersebut, mengingat potensi dampaknya yang bisa merugikan usaha SPA yang sedang berkembang di Bali, terutama ketika Bali sedang berupaya mengembangkan pariwisata *wellness* SPA dengan pendekatan lokal Bali.

Tabel 4.3. Analisis Artikel Berita 3

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul Lead</b>	Kenaikan Pajak Hiburan dan SPA, PHRI : Ojo Kesusu Para pengusaha dan pelaku pariwisata di Bali merasa bahwa kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) hingga 40% terlalu drastis dan memberatkan bagi mereka yang termasuk dalam kategori PBJT.
	<b>Latar Informasi</b>	Keresahan para pelaku usaha di Bali terkait kenaikan pajak barang dan jasa tertentu yang naik terlalu ekstrem.
	<b>Kutipan Sumber</b>	I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya (Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Bali)
		<ol style="list-style-type: none"> <li>"Dari 15% naik langsung menjadi 40%, jika ada kenaikan sebaiknya dilakukan secara bertahap agar tidak terlalu memberatkan. Mengejutkan usaha dengan kenaikan pajak yang ekstrem seperti itu bisa merugikan. Kita harus berhati-hati karena saat ini sedang dalam tahap pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan."</li> <li>"Kami mendesak pemerintah untuk melakukan revisi terhadap kebijakan ini. Penutupan bisnis SPA secara massal akan meningkatkan jumlah pengangguran di Bali. Kenaikan pajak akan mengakibatkan kenaikan harga, namun jika tidak ada pendapatan, bisnis SPA akan terpaksa tutup, yang pada akhirnya juga berdampak pada penerimaan pajak. Kami berharap agar pemerintah mengajak kami untuk berdiskusi mengenai peningkatan pajak secara bertahap, daripada langsung melonjak ke 40%, yang tentunya akan menimbulkan protes dan tidak masuk akal."</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Suryawijaya menyatakan bahwa kebijakan tersebut kurang tepat dan kurang disosialisasikan dengan baik karena membandingkan besaran pajak Spa dengan pajak hiburan seperti klub malam dan tempat karaoke. Padahal, bisnis-bisnis tersebut melayani segmen konsumen yang berbeda.</li> </ol>
<b>Penutup</b>	Pemberitaan ditutup dengan informasi dari penulis yakni UU tentang	
Struktur Skrip	<b>What</b>	I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya merasa kenaikan PBJT terlalu ekstrem dan memberatkan pelaku usaha di Bali

	<b>Where</b>	Denpasar
	<b>When</b>	8 Januari 2024
	<b>Who</b>	I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya
	<b>Why</b>	Adanya kenaikan PBJT membuat para pelaku usaha di Bali keberatan dan mendesak pemerintah guna meninjau ulang kebijakan tersebut
	<b>How</b>	Dengan adanya kebijakan kenaikan PBJT 40% dan keluhan para pelaku usaha, pemerintah melakukan peninjauan ulang terkait kebijakan tersebut.
<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Dalam artikel ini tiap paragraf menginformasikan keluhan pelaku usaha di Bali dan mendesak pemerintah atas kebijakan yang membuat kaget pengusaha dengan menaikkan pajak hingga 40%. Kemudian paragraf selanjutnya membahas
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat kata frasa daerah yaitu kata ganti “ <i>ojo kesusu</i> ” yang dimaksud dengan jangan terburu-buru dan terdapat kata “ <i>kami</i> ” yang dimaksud para pelaku usaha. Selain itu, penggunaan foto yang menggambarkan ilustrasi tempat perawatan kecantikan yang juga terkena dampak dari kenaikan pajak hiburan.

*Sumber: Olahan Peneliti*

## Rincian Analisis

### a. Struktur Sintaksis

- Berdasarkan struktur sintaksis, wartawan ingin menginformasikan terkait para pelaku usaha yang keberatan atas kenaikan PBJT khususnya pajak hiburan hingga 40% di Bali. Hal ini didukung pada lead artikel berita ini yang ditonjolkan oleh penulis yaitu para pengusaha dan pelaku pariwisata di Bali merasa bahwa kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) hingga 40% terlalu drastis dan memberatkan bagi mereka yang termasuk dalam kategori PBJT. Dalam latar informasi juga penulis menjelaskan terkait keresahan para pelaku usaha di Bali terkait kenaikan pajak barang dan jasa tertentu yang naik terlalu ekstrem. Sementara itu kutipan dari I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya selaku pelaku usaha di Bali yang berisi protes dan tidak paham dengan latar belakang pemerintah dengan menaikkan pajak hingga 40% dan mencoba mendesak pemerintah agar meninjau ulang kebijakan tersebut.

### b. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yaitu I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya merasa kenaikan PBJT terlalu ekstrem dan memberatkan pelaku usaha di Bali. Selanjutnya *where* dan *when* yaitu Denpasar, 8 Januari 2024, lalu *who* yaitu I Gusti

Ngurah Rai Suryawijaya selaku Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, dan why yakni Adanya kenaikan PBJT membuat para pelaku usaha di Bali keberatan dan mendesak pemerintah guna meninjau ulang kebijakan tersebut. Unsur selanjutnya yaitu how, dengan adanya kebijakan kenaikan PBJT 40% dan keluhan para pelaku usaha, pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan tersebut.

**c. Struktur Tematik**

Berdasarkan struktur tematik dalam artikel secara keseluruhan dari awal paragraf hingga paragraf penutup memiliki keterkaitan bagaimana I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya dan penulis menyampaikan pernyataan terkait kebijakan PBJT yang meningkat hingga 40% membuat para pelaku usaha di Bali keberatan dan kaget. Sementara itu pada paragraf akhir penulis menyampaikan UU terkait hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang menyebut PBJT khususnya pajak hiburan diskotek, mandi uap/spa, karaoke, kelab malam, dan bar.

**d. Struktur Retoris**

Berdasarkan struktur retoris, terdapat kata frasa daerah yaitu kata ganti “ojo kesusu” yang dimaksud dengan jangan terburu-buru dan terdapat kata “kami” yang dimaksud para pelaku usaha. Selain itu, penggunaan foto yang menggambarkan ilustrasi tempat perawatan kecantikan yang juga terkena dampak dari kenaikan pajak hiburan.

**4. Analisis Artikel Berita 4**

**Judul** : Pengusaha Bar Teriak, Omzet Anjlok hingga 40% Imbas Pajak Hiburan Terbaru

**Sumber** : Bisnis.com

**Tanggal** : 26 Januari 2024

**Ringkasan** : Kelompok pengusaha bar mengeluhkan adanya penurunan omzet 30-40% imbas kabar kenaikan pajak hiburan 40%-75% yang diterapkan oleh pemerintah. Komisaris Utama Black Owl yakni Efrat Tio mengatakan kekhawatiran pelanggan mengenai kenaikan pajak hiburan

hingga menimbulkan keraguan pada saat ingin melakukan reservasi di barnya. Meskipun aturan pajak terbaru itu belum diterapkan karena masih menuai konflik. Aturan pajak hiburan 40% dipastikan akan memukul usahanya semakin dalam. Penurunan omzet hingga 40% pun kini sudah dirasakan outlet Black Owl di Jakarta. Secara terperinci, Efrat menyebut selama ini keuntungan bersih usahanya hanya di kisaran 5%-10%. Adanya pajak hiburan hingga 40% tentunya akan membuat keuangan usaha menjadi defisit.

Tabel 4.4. Analisis Artikel Berita 4

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Pengusaha Bar Teriak, Omzet Anjlok hingga 40% Imbas Pajak Hiburan Terbaru
	<b>Lead</b>	Kelompok pengusaha bar mengeluhkan adanya penurunan omzet 30-40% imbas kabar kenaikan pajak hiburan 40%-75% yang diterapkan oleh pemerintah.
	<b>Latar Informasi</b>	Kelompok pengusaha mengeluh kenaikan pajak hiburan 40%-75%.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Efrat Tio (Komisaris Utama Black Owl) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Para pelanggan mengkhawatirkan kenaikan pajak hiburan yang menyebabkan keraguan saat ingin reservasi bar”</li> <li>2. “Untuk sekarang, kami belum menerapkan di lapangan, walaupun telah disosialisasikan. Untuk tingkat kunjungan dan reservasi sudah turun sekitar 30%-40%. Gimana jika sudah benar-benar diterapkan? Wah, habis kita”</li> <li>3. “Kenaikan pajak hiburan sangat berdampak bagi keberlangsungan tenaga kerja usaha bar. Black Owl memiliki pekerja hamper 1.000 orang”</li> <li>4. “ya jika harus tutup akan kita lay off (PHK karyawan)</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini</b>	Hotman Paris (pelaku usaha sektor hiburan) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Bahkan jika di daerah sudah menerapkan 75% dari gross pendapatan. Masuk di akal ga lo?”</li> <li>2. “Kita 40% bahkan 75% itupun pendapatan kotor. Kemudian digunakan bayar pajak Pph 20%. Bayar pajak karyawan, minimum Ppn 11%. Jadi untuk pajak hampir 100%, negara apa ini?”</li> <li>3. “Kalau terdapat (kepala daerah) yang masih ragu tolong baca pasal ini. Diperbolehkan menggunakan tarif lama, tanpa harus kami minta.”</li> </ol>
Struktur Skrip	<b>Penutup</b>	Artikel ini ditutup dengan pernyataan dari Hotman Paris selaku pengacara dan pelaku industri hiburan yang terdampak.
	<b>What</b>	Kenaikan Pajak Hiburan
	<b>Where</b>	Jakarta
	<b>When</b>	Jumat, 26 Januari 2024
	<b>Who</b>	Efrat Tio dan Hotman Paris

	<b>Why</b>	Kenaikan pajak hiburan membuat para pengusaha mengeluh penurunan omzet.
	<b>How</b>	Kenaikan pajak hiburan yang membuat para pelanggan khawatir dan enggan melakukan reservasi tempat membuat penurunan omzet usaha, meskipun kebijakan tersebut belum sepenuhnya diterapkan karena masih menuai konflik.
<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Dalam artikel ini tiap paragraf menginformasikan keluhan para pelaku usaha yang terkena dampak kenaikan pajak hiburan. Kemudian dalam artikel ini juga menuliskan pasal yang berkaitan serta solusi terkait kenaikan pajak hiburan yang terjadi sekaligus menunggu proses hasil <i>judicial review</i> .
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Penggunaan foto pada artikel ini yang menggambarkan ilustrasi tempat hiburan malam yakni salah satu bar yang terkena dampak dari kebijakan kenaikan pajak hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah secara resmi. Selain itu, terdapat kata frasa hukum " <i>judicial review</i> " yakni bermaksud Pemeriksaan terhadap keabsahan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi melalui serangkaian prosedur uji konstitusionalitas.

Sumber: Olahan Peneliti

## Rincian Analisis

### a. Struktur Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis, wartawan ingin menginformasikan dampak dari kenaikan pajak hiburan 40%-75%, yakni membuat omzet usaha hiburan menurun, membuat pelanggan ragu untuk datang atau reservasi. Artikel ini diberi judul "Pengusaha Bar Teriak, Omzet Anjlok hingga 40% Imbas Pajak Hiburan Terbaru", menginformasikan pendapat dan keluhan para pelaku usaha yang terkena dampak, hal itu selaras dengan *lead* dan latar informasi dalam artikel. Penulis dalam artikel mencantumkan sumber dari pihak terkait, yaitu Efrat Tio dan Hotman Paris selaku pelaku usaha yang terdampak. Melalui kutipan sumber, penulis dapat memberikan informasi secara seimbang. Artikel tersebut ditutup dengan kutipan pernyataan dari Hotman Paris. Melalui elemen-elemen pada struktur sintaksis, penulis berfokus pada dampak dan solusi yang dikatakan oleh Efrat Tio dan Hotman Paris.

### b. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yaitu para pelaku usaha mengeluhkan kenaikan pajak hiburan. Selanjutnya *where* dan *when* yaitu Jakarta, 26 Januari 2024. Lalu,

*who* dan *why* yaitu para pelaku usaha Efrat Tio dan Hotman Paris berpendapat bahwa Kenaikan pajak hiburan membuat para pengusaha mengeluh penurunan omzet. Dan *how* yaitu Kenaikan pajak hiburan yang membuat para pelanggan khawatir dan enggan melakukan reservasi tempat membuat penurunan omzet usaha, meskipun kebijakan tersebut belum sepenuhnya diterapkan karena masih menuai konflik. Penulis dalam artikel ini bersifat informasi yang memfokuskan pendapat dari narasumber atau pelaku usaha yang terkena dampak kenaikan pajak hiburan.

**c. Struktur Tematik**

Berdasarkan struktur tematik dalam artikel secara keseluruhan dari awal paragraf hingga paragraf penutup memiliki keterkaitan bagaimana Efrat Tio dan Hotman Paris menjelaskan dampak yang terjadi dari adanya kenaikan pajak hiburan, dan solusi yang diberikan dari adanya kontroversi. Seperti pernyataan pendapat, penjelasan, dan penyebab keluhan para pelaku usaha yang terdampak kenaikan pajak hiburan.

**d. Struktur Retoris**

Berdasarkan struktur retoris, Penggunaan foto pada artikel ini yang menggambarkan ilustrasi tempat hiburan malam yakni salah satu bar yang terkena dampak dari kebijakan kenaikan pajak hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah secara resmi. Selain itu, terdapat kata frasa "*judicial review*" yakni bermaksud Pemeriksaan terhadap keabsahan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi melalui serangkaian prosedur uji konstitusionalitas.

**5. Analisis Artikel Berita 5**

**Judul** : Tolak Kenaikan Pajak Hiburan Hingga 75%, Hotman Paris Surati Luhut

**Sumber** : Bisnis.com

**Tanggal** : 17 Januari 2024

**Ringkasan** : Dalam surat yang diterima oleh Bisnis, Hotman Paris bersama Tim Hotman 911 telah mengirimkan surat kepada Luhut pada hari

Rabu untuk meminta penundaan penerapan Pasal 58 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hotman Paris, yang mewakili para pengusaha, memohon kepada pemerintah pusat untuk menggunakan kewenangannya untuk menunda penerapan atau mengubah kenaikan tarif tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah pusat sesuai dengan Pasal 97 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tabel 4.5. Analisis Artikel Berita 5

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Tolak Kenaikan Pajak Hiburan Hingga 75%, Hotman Paris Surat Luhut
	<b>Lead</b>	Hotman Paris, seorang pengacara terkenal, mengirim surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait dengan peningkatan tarif pajak hiburan yang baru ditetapkan hingga 75%.
	<b>Latar Informasi</b>	Hotman Paris salah satu pelaku usaha yang mewakilkan terkait penolakan adanya kenaikan pajak hiburan hingga 75%
	<b>Kutipan Sumber</b>	Hotman Paris <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Peningkatan drastis dalam tarif pajak hiburan ini dianggap tidak sesuai dan melenceng dari arah yang tepat. Sebagai contoh, sektor ini berperan sebagai penyedia lapangan kerja yang besar bagi masyarakat Indonesia secara luas, tanpa memandang latar belakang pendidikan."</li> <li>2. "Atau untuk memperkuat landasan hukumnya, kami meminta Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dapat menunda atau mencabut penerapan Pasal 58 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2022."</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini</b>	1. Hotman Paris mewakili, sebagai perwakilan pengusaha, meminta kepada pemerintah pusat agar menggunakan kewenangannya untuk menunda atau mengubah kenaikan tarif tersebut berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah pusat seperti yang diatur dalam Pasal 97 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
	<b>Penutup</b>	Artikel ditutup dengan kutipan dari Hotman Paris yang menyatakan permohonan kepada presiden agar tidak mengeluarkan atau membatalkan kebijakan pada pasal 58 ayat 2 UU 1 tahun 2022.
Struktur Skrip	<b>What</b>	Hotman Paris tolak kenaikan pajak hiburan hingga 75%
	<b>Where</b>	Jakarta
	<b>When</b>	17 Januari 2024
	<b>Who</b>	Hotman Paris dan Luhut Pandjaitan
	<b>Why</b>	Hotman Paris menyatakan bahwa kenaikan pajak hiburan yang sangat tinggi dan sudah keluar jalur.
	<b>How</b>	Perihal surat yang dibuat oleh Hotman Paris dituju kepada Presiden Joko Widodo agar dilakukan pembatalan kebijakan Pasal 58 ayat 2 tahun 2022.
Struktur Tematik	<b>Paragraf, proposisi kalimat,</b>	Dalam artikel ini tiap paragraf menginformasikan pernyataan dari Hotman Paris yang menolak adanya kebijakan baru yakni kenaikan pajak hiburan hingga 75%. Kemudian paragraf akhir

<b>Struktur Retoris</b>	<b>hubungan antar kalimat</b> <b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Hotman juga meminta permohonan agar pemerintah membatalkan undang-undang tersebut. Terdapat kata “memohon”, “mematikan”, “menghilangkan” yang menekankan adanya kebijakan baru tersebut sangat berdampak. Selain itu, terdapat foto Pengacara Hotman Paris, yang menggambarkan Hotman sedang diwawancara oleh wartawan.
-------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Sumber: Olahan Peneliti*

## Rincian Analisis

### a. Struktur Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis, wartawan ingin menginformasikan bahwa Hotman Paris, yang mewakili para pengusaha, memohon kepada pemerintah pusat untuk menggunakan kewenangannya agar dapat menunda penerapan atau mengubah kenaikan tarif tersebut, hal itu selaras dengan *lead* dan latar informasi dalam artikel. Penulis dalam artikel mencantumkan

- sumber dari pihak terkait, yaitu Hotman Paris dan Luhut Pandjaitan. Melalui kutipan sumber, penulis dapat memberikan informasi secara seimbang. Artikel tersebut ditutup dengan kutipan pernyataan dari Hotman Paris yang menyatakan permohonan kepada presiden agar tidak mengeluarkan atau membatalkan kebijakan pada pasal 58 ayat 2 UU 1 tahun 2022. Melalui elemen-elemen pada struktur sintaksis, penulis berfokus menginformasikan.

### b. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yaitu Hotman Paris tolak kenaikan pajak hiburan hingga 75%. Selanjutnya *where* dan *when* yaitu Jakarta, 17 Januari 2024. Lalu, *who* dan *why* yaitu Hotman Paris dan Luhut Pandjaitan, Hotman juga menyatakan bahwa kenaikan pajak hiburan yang sangat tinggi dan sudah keluar jalur. Dan *how* yaitu Perihal surat yang dibuat oleh Hotman Paris dituju kepada Presiden Joko Widodo agar dilakukan pembatalan kebijakan Pasal 58 ayat 2 tahun 2022.

### c. Struktur Tematik

Berdasarkan struktur tematik, dalam artikel secara keseluruhan dari awal paragraf hingga paragraf penutup memiliki keterkaitan bagaimana penulis menginformasikan pernyataan dari Hotman Paris yang menolak adanya kebijakan baru yakni kenaikan pajak hiburan hingga 75%. Kemudian paragraf akhir Hotman juga meminta permohonan agar pemerintah membatalkan undang-undang tersebut.

### d. Struktur Retoris

Berdasarkan struktur retoris, dalam artikel ini terdapat kata “memohon”, “mematikan”, “menghilangkan” yang menekankan adanya kebijakan baru tersebut sangat berdampak. Selain itu, terdapat foto Pengacara Hotman Paris, yang menggambarkan sedang diwawancara oleh wartawan.

## 6. Analisis Artikel Berita 6

**Judul** : Jokowi Mau Kasih Insentif PPh Badan Jasa Hiburan 10%, GIPI: Tak Menarik

**Sumber** : Bisnis.com

**Tanggal** : 22 Januari 2024

**Ringkasan** : Rencana pemerintah untuk memberikan insentif fiskal terhadap pajak penghasilan badan atas penyelenggara jasa hiburan dianggap tidak menarik oleh pengusaha, mengingat kondisi saat ini. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Hariyadi Sukamdani, menyatakan bahwa insentif fiskal sebesar 10% yang diikuti dengan tarif pajak hiburan minimal 40% tidak memberikan bantuan yang signifikan bagi pengusaha. Pajak hiburan sebesar minimal 40% ini diterapkan kepada pelanggan, sementara pihak penyelenggara jasa hiburan juga harus membayar Pajak Penghasilan Badan sebesar 22%. Meskipun demikian, para pelaku usaha merasa bahwa insentif tersebut tidak cukup membantu karena besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Dalam kesempatan yang sama, Hotman Paris, pengusaha diskotek, mengkritik kebijakan tarif 40% yang

dianggap merugikan para pengusaha. Hotman menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh dari jasa hiburan tidak mencapai 10%.

Tabel 4.6. Analisis Artikel Berita 6

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Jokowi Mau Kasih Insentif PPh Badan Jasa Hiburan 10%, GIPI: Tak Menarik
	<b>Lead</b>	Para pengusaha merasa bahwa rencana pemerintah untuk memberikan insentif fiskal terhadap pajak penghasilan (PPh) badan atas penyelenggara jasa hiburan tidak menarik mengingat situasi ekonomi saat ini.
	<b>Latar Informasi</b>	Rencana pemerintah memberikan insentif 10% untuk para pengusaha terkait kebijakan kenaikan pajak hiburan hingga 40% dan tertinggi 75% yang telah ditetapkan.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator bidang Perekonomian)
Struktur Skrip	<b>Pernyataan Opini</b>	<p>1. "Dalam konteks di mana UU No. 1/2022 sudah terstruktur dengan komposit, insentif tersebut dianggap kurang menarik. Namun, jika kebijakan ini dapat dibatalkan dan kembali ke keadaan sebelumnya, maka itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Saat ini, kondisinya kurang menguntungkan."</p> <p>Hotman Paris (Pengacara sekaligus pelaku usaha hiburan)</p> <p>1. "Praktisnya, hampir semua pendapatan kita terkena pajak 100%. Jadi, jika memang tujuannya adalah untuk menghancurkan kami, sebaiknya tidak usah menggunakan undang-undang atau memberikan izin."</p> <p>1. Pajak hiburan dengan tarif minimum 40% ini akan dikenakan kepada pelanggan, sementara penyelenggara jasa hiburan juga akan dikenakan PPh Badan sebesar 22%.</p>
	<b>Penutup</b>	Pemberitaan ditutup dengan kutipan dari Hotman Paris yang menyatakan bahwa perhitungan pembayaran pajak untuk pemerintah hampir mencapai 100%.
	<b>What</b>	Rencana pemerintah memberikan insentif fiskal 10% terhadap pajak penghasilan (PPh).
	<b>Where</b>	Jakarta
Struktur Tematik	<b>When</b>	22 Januari 2024
	<b>Who</b>	Airlangga Hartarto dan Hotman Paris
	<b>Why</b>	Pajak insentif fiskal 10% yang diberikan pemerintah untuk para pengusaha dianggap tidak menarik.
	<b>How</b>	Rencana pemerintah memberikan insentif fiskal terhadap pajak penghasilan badan atas penyelenggara jasa hiburan dianggap tidak menarik oleh pengusaha. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Hariyadi Sukamdani, menyatakan bahwa insentif fiskal sebesar 10% yang diikuti dengan tarif pajak hiburan minimal 40% tidak memberikan bantuan yang signifikan bagi pengusaha.
Struktur Retoris	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Pada awal paragraf berita membahas tentang penjelasan perencanaan pemerintah yang memberikan insentif fiskal. Lalu pada paragraf menengah isi pemberitaan menyampaikan UU terkait hubungan keuangan pemerintah daerah dan pusat, serta pernyataan para pengusaha yang mengatakan bahwa insentif yang diberikan pemerintah tidak membantu. Sementara pada paragraf akhir Hotman Paris menyatakan keluhannya terkait tingginya pajak hiburan yang harus pelaku usaha bayarkan.
	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat sebuah foto yang menggambarkan Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum GIPI) bersama Hotman Paris selaku pengusaha hiburan sekaligus pengacara yang sedang

---

memberikan keterangan kepada pers usai rapat di Kementerian Koordinator bidang perekonomian. Selain itu, terdapat kata “kompositif” yang bermaksud gabungan atau susunan dalam UU yang ditetapkan.

---

Sumber: *Olahan Peneliti*

## Rincian Analisis

### a. Struktur Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis dalam pemberitaan ini dengan judul “Jokowi Mau Kasih Insentif PPh Badan Jasa Hiburan 10%, GIPI: Tak Menarik”, penulis menginformasikan rencana pemerintah yang akan memberikan bantuan insentif kepada para pengusaha. Hal ini didukung pada bagian lead yaitu para pengusaha merasa bahwa rencana pemerintah untuk memberikan insentif fiskal terhadap pajak penghasilan (PPh) badan atas penyelenggara jasa hiburan tidak menarik mengingat situasi ekonomi saat ini. Dalam latar informasi juga menginformasikan bahwa Rencana pemerintah memberikan insentif 10% untuk para pengusaha terkait kebijakan kenaikan pajak hiburan hingga 40% dan tertinggi 75% yang telah ditetapkan. Sementara itu terdapat kutipan dari Hotman Paris yang berisi protes terkait pajak yang terlalu tinggi terhitung hampir 100% yang akan membinasakan para pengusaha.

### b. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yaitu Rencana pemerintah memberikan insentif fiskal 10% terhadap pajak penghasilan (PPh). Selanjutnya *where* dan *when* yaitu Jakarta, 22 Januari 2024. Lalu, *who* yaitu Airlangga Hartarto dan Hotman Paris, dan *why* yaitu pajak insentif fiskal 10% yang diberikan pemerintah untuk para pengusaha dianggap tidak menarik. Dan *how* yaitu rencana pemerintah memberikan insentif fiskal terhadap pajak penghasilan badan atas penyelenggara jasa hiburan dianggap tidak menarik oleh pengusaha. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Hariyadi Sukamdani, menyatakan bahwa insentif fiskal sebesar 10% yang diikuti dengan tarif pajak hiburan minimal 40% tidak memberikan bantuan yang signifikan bagi pengusaha. Penulis dalam artikel ini bersifat informasi yang

memfokuskan upaya pemerintah dalam merespons protes para pelaku usaha yang tidak setuju terkait kenaikan pajak hiburan yang terjadi.

**c. Struktur Tematik**

Berdasarkan struktur tematik dalam artikel secara keseluruhan dari awal paragraf hingga paragraf penutup memiliki keterkaitan bagaimana rencana atau upaya pemerintah untuk memberikan insentif fiskal yang direspons oleh para pengusaha karena dianggap tidak membantu dengan adanya kenaikan pajak hiburan yang cukup tinggi. Sementara pada paragraf terakhir berisi tentang pernyataan Hotman Paris yang mengatakan bahwa hampir 100% pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah dan akan membuat para pengusaha binasa.

**d. Struktur Retoris**

Berdasarkan struktur retoris, pada artikel ini menampilkan foto yang menggambarkan Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum GPII) bersama Hotman Paris selaku pengusaha hiburan sekaligus pengacara yang sedang memberikan keterangan kepada pers usai rapat di Kementerian Koordinator bidang perekonomian. Selain itu, terdapat kata “kompositif” yang bermaksud gabungan atau susunan dalam UU yang ditetapkan.

**7. Analisis Artikel Berita 7**

**Judul** : Temui Menparekraf, Ni Luh Djelantik Ungkap Dampak Pajak Hiburan 40% Bagi Pariwisata Bali

**Sumber** : Bisnis.com

**Tanggal** : 22 Januari 2024

**Ringkasan** : Aktivis sosial Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik mengkritik keputusan untuk menetapkan pajak hiburan sebesar 40%-75%, menganggapnya dapat merugikan masyarakat, terutama para pelaku usaha dan pekerja di sektor hiburan. Ia meminta Menparekraf Sandiaga Uno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengunjungi Bali dan melihat sendiri dampaknya pada industri hiburan yang sekarang lesu pasca

pandemi Covid-19. Ni Luh juga mengkhawatirkan bahwa pajak yang tinggi dapat mendorong konsumen untuk mencari hiburan di luar negeri, mengancam industri hiburan lokal.

Tabel 4.7. Analisis Artikel Berita 7

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Temui Menparekraf, Ni Luh Djelantik Ungkap Dampak Pajak Hiburan 40% Bagi Pariwisata Bali
	<b>Lead</b>	Menurut aktivis sosial Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, keputusan untuk menetapkan pajak hiburan antara 40%-75% dianggap dapat merugikan masyarakat, terutama mereka yang terlibat dalam bisnis dan pekerjaan di sektor jasa hiburan.
	<b>Latar Informasi</b>	Aktivis Sosial Ni Luh Djelantik menilai kebijakan pajak hiburan 40%-75% dapat merusak usaha hiburan
	<b>Kutipan Sumber</b>	Ni Luh Djelantik (Aktivis Sosial)  1. “Menyamakan hal itu dengan membahayakan kehidupan rakyat karena ribuan pekerja terlibat di sana, termasuk di restoran, bar, dan klub malam”  Rai Suryawijaya (Ketua PHRI)  1. “Bagi mereka, insentif fiskal tidaklah diperlukan” 2. “Kami mengkhawatirkan bahwa jika jumlah wisatawan menurun, maka ekonomi Bali akan mengalami krisis lagi karena 60% dari perekonomian Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata.” 3. “Pemerintah daerah seharusnya berani dan tegas dalam menangani situasi, dengan menggunakan petunjuk pelaksanaan yang lebih lama, yang lebih sesuai dengan kondisi daerah mereka”
	<b>Pernyataan Opini</b>	1. Pajak hiburan yang tinggi berpotensi membuat konsumen yang mencari hiburan atau relaksasi lebih memilih untuk berlibur ke luar negeri. Oleh karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah mengambil contoh dari Thailand. Thailand, yang dikenal sebagai "Negeri Gajah Putih", menetapkan tarif pajak hiburan sebesar 5%.
	<b>Penutup</b>	Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Rai Suryawijaya yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memahami keadaan daerahnya terkait PBJT.
Struktur Skrip	<b>What</b>	Ni Luh Djelantik (Aktivis Sosial) menilai kebijakan kenaikan pajak hiburan 40%-75% dapat membunuh masyarakat terutama pelaku usaha hiburan.
	<b>Where</b>	Jakarta
	<b>When</b>	22 Januari 2024
	<b>Who</b>	Ni Luh Djelantik dan Rai Suryawijaya
	<b>Why</b>	Penetapan pajak hiburan 40%-75% dapat membunuh usaha hiburan.
	<b>How</b>	Pernyataan dari Ni Luh Djelantik dan Rai Suryawijaya menegaskan bahwa kenaikan pajak hiburan 40%-75% merusak usaha hiburan dan upaya memberikan insentif fiskal kurang tepat.
Struktur Tematik	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Dalam artikel ini tiap paragraf menginformasikan pernyataan sekaligus protes Ni Luh Djelantik terkait kenaikan tarif pajak hiburan 40%-75% yang memberatkan para pelaku usaha hiburan. Serta pernyataan kekhawatiran Rai Suryawijaya terkait perekonomian Bali di sektor pariwisata.

<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat unsur koherensi yaitu kata ganti “dia” yang dimaksud yaitu Ni Luh Djelantik dan Rai Suryawijaya. Selain itu, terdapat foto yang ramai wisatawan sedang menikmati keindahan pantai di kawasan Tanah Lot, Bali.
-------------------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Sumber: Olahan Peneliti*

## **Rincian Analisis**

### **a. Struktur Sintaksis**

Berdasarkan struktur sintaksis, penulis dalam artikel ini menyampaikan pernyataan seorang Aktivist sosial yang menilai kenaikan pajak hiburan terlalu tinggi hingga 40%-75%. Ni Luh Djelantik (Aktivist Sosial) juga meminta Menkeu Sri Mulyani dan Menparekraf Sandiaga Uno untuk terjun langsung melihat kondisi industri jasa hiburan di Bali pasca pandemi. Lead dan latar informasi juga menekankan pada kebijakan kenaikan pajak yang merusak usaha di sektor hiburan. Kutipan sumber dalam artikel menjelaskan protes pelaku usaha sektor hiburan yang mengkhawatirkan perekonomian Bali dan tidak membutuhkan insentif fiskal dari pemerintah. Artikel ditutup dengan kutipan dari Rai Suryawijaya yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memahami keadaan daerahnya terkait PBJT.

### **b. Struktur Skrip**

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yaitu Ni Luh Djelantik (Aktivist Sosial) menilai kebijakan kenaikan pajak hiburan 40%-75% dapat membunuh masyarakat terutama pelaku usaha hiburan. Selanjutnya *where* dan *when* yaitu Jakarta, 22 Januari 2024. Lalu, *who* dan *why* yaitu Ni Luh Djelantik dan Rai Suryawijaya, terkait Penetapan pajak hiburan 40%-75% dapat membunuh usaha hiburan. Dan *how* yaitu pernyataan dari Ni Luh Djelantik dan Rai Suryawijaya menegaskan bahwa kenaikan pajak hiburan 40%-75% merusak usaha hiburan dan upaya memberikan insentif fiskal kurang tepat.

### **c. Struktur Tematik**

Berdasarkan struktur tematik dalam artikel secara keseluruhan dari awal paragraf hingga paragraf penutup memiliki keterkaitan bagaimana penulis menginformasikan pernyataan sekaligus protes Ni Luh Djelantik terkait

kenaikan tarif pajak hiburan 40%-75% yang memberatkan para pelaku usaha hiburan. Serta pernyataan kekhawatiran Rai Suryawijaya terkait perekonomian Bali di sektor pariwisata. Seperti pernyataan dan keluhan dari Ni Luh Djelantik dan Rai Suryawijaya dalam artikel tersebut.

**d. Struktur Retoris**

Berdasarkan struktur retoris terdapat unsur koherensi yaitu kata ganti “dia” yang dimaksud yaitu Ni Luh Djelantik dan Rai Suryawijaya. Terdapat foto yang ramai wisatawan sedang menikmati keindahan pantai di kawasan Tanah Lot, Bali.

**8. Analisis Artikel Berita 8**

- Judul** : Bahas Pajak Hiburan, Hotman hingga Inul Sambangi Markas Airlangga Hartarto
- Sumber** : Bisnis.com
- Tanggal** : 22 Januari 2024
- Ringkasan** : Pengacara terkenal Hotman Paris dan penyanyi dangdut Inul Daratista mengunjungi Kantor Kementerian Bidang Perekonomian. Selanjutnya, Luhut juga mengumumkan bahwa pemerintah akan mengevaluasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sambil menunggu hasil peninjauan judicial yang diajukan oleh sejumlah asosiasi ke Mahkamah Konstitusi.

Tabel 4.8. Analisis Artikel Berita 8

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
<b>Struktur Sintaksis</b>	<b>Judul</b>	Bahas Pajak Hiburan, Hotman hingga Inul Sambangi Markas Airlangga Hartarto
	<b>Lead</b>	Pengacara terkenal Hotman Paris dan penyanyi dangdut Inul Daratista mengunjungi Kantor Kementerian Bidang Perekonomian (Kemenko Ekon) pada hari Senin (22/1/2024) untuk membicarakan peningkatan tarif pajak hiburan sebesar 40% hingga 75%.
	<b>Latar Informasi</b>	Perwakilan pelaku usaha bisnis mendatangi Kantor Kementerian untuk membahas kenaikan pajak 40-75%.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Jadi, kita ingin menunda penerapannya terlebih dahulu karena, dari Komisi XI DPR RI sebenarnya, bukan keputusan langsung dari pemerintah begitu saja."</li> <li>2. "Saya rasa hal itu harus dipertimbangkan karena tingginya komitmen pemerintah terhadap kepentingan rakyat kecil."</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini</b>	<p>Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Gipi)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Contohnya, DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, bagaimana dengan hal itu? Apakah Pelaksana Tugas Gubernur [Heru Budi Hartono] akan menunda atau bagaimana? Kita masih belum memahami mekanismenya."</li> </ol>
	<b>Penutup</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada alasan yang cukup kuat untuk menaikkan pajak hiburan pada saat ini, sehingga pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan tersebut.</li> </ol>
<b>Struktur Skrip</b>	<b>What</b>	Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Hariyadi Sukamdani selaku Ketua Umum Gipi
	<b>Where</b>	Hotman Paris dan Inul Daratista menghadiri rapat kenaikan pajak hiburan.
	<b>When</b>	Jakarta
	<b>Who</b>	22 Januari 2024
	<b>Why</b>	Hariyadi Sukamdani dan Luhut Binsar Pandjaitan
	<b>How</b>	Terdapat permohonan penundaan penerapan kebijakan kenaikan pajak hiburan.
<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Pemerintah mengadakan evaluasi terhadap UU no.1 tahun 2022 terkait hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, sekaligus menunggu hasil dari <i>judicial review</i> .
	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Pada awal paragraf artikel menginformasikan tentang Hotman Paris dan Inul Daratista yang datang ke Kantor Kementerian untuk membahas kenaikan pajak hiburan 40-75%. Kemudian paragraf selanjutnya membahas terkait pemerintah yang harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan baru tersebut.
		Terdapat kata frasa hukum " <i>judicial review</i> " yakni bermaksud Pemeriksaan terhadap keabsahan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi melalui serangkaian prosedur uji konstitusionalitas. Selain itu penggunaan foto Pengacara Hotman Paris dan Hariyadi Sukamdani yang sedang melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian guna membahas kebijakan kenaikan pajak hiburan 40-75%.
<b>Struktur Retoris</b>		

Sumber: Olahan Peneliti

## Rincian Analisis

### a. Struktur Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis, wartawan ingin menginformasikan terkait Pengacara Hotman Paris dan penyanyi dangdut Inul Daratista mengunjungi Kantor Kementerian Bidang Perekonomian. Menko Marves Luhut Pandjaitan juga mengumumkan bahwa pemerintah akan mengevaluasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sambil menunggu hasil peninjauan judicial yang diajukan oleh sejumlah asosiasi ke Mahkamah Konstitusi. hal itu selaras dengan *lead* dan latar informasi dalam artikel. Penulis dalam artikel mencantumkan sumber dari pihak terkait, yaitu

Hariyadi Sukamdani dan Luhut Binsar Pandjaitan. Melalui kutipan sumber, penulis dapat memberikan informasi secara seimbang. Artikel tersebut ditutup dengan kutipan dari Hariyadi Sukamdani selaku Ketua Umum Gipi.

**b. Struktur Skrip**

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yaitu Hotman Paris dan Inul Daratista menghadiri rapat kenaikan pajak hiburan. Selanjutnya *where* dan *when* yaitu Jakarta, 22 Januari 2024. Lalu, *who* dan *why* yaitu Hariyadi Sukamdani dan Luhut Binsar Pandjaitan yang membahas permohonan penundaan penerapan kebijakan kenaikan pajak hiburan. Dan *how* yaitu Pemerintah mengadakan evaluasi terhadap UU no.1 tahun 2022 terkait hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, sekaligus menunggu hasil dari *judicial review*.

**c. Struktur Tematik**

Berdasarkan struktur tematik, dalam artikel secara keseluruhan dari awal paragraf hingga paragraf penutup memiliki keterkaitan bagaimana penulis menginformasikan tentang Hotman Paris dan Inul Daratista yang datang ke Kantor Kementerian untuk membahas kenaikan pajak hiburan 40-75%. Kemudian paragraf selanjutnya membahas terkait pemerintah yang harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan baru tersebut.

**d. Struktur Retoris**

Berdasarkan struktur retoris, dalam artikel ini terdapat kata frasa hukum "*judicial review*" yakni bermaksud Pemeriksaan terhadap keabsahan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi melalui serangkaian prosedur uji konstitusionalitas. Selain itu penggunaan foto Pengacara Hotman Paris dan Hariyadi Sukamdani yang sedang melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian guna membahas kebijakan kenaikan pajak hiburan 40-75%.

## 9. Analisis Artikel Berita 9

**Judul** : Pakar: Penundaan Kenaikan Pajak Hiburan Dapat Genjot Minat Wisatawan

**Sumber** : Bisnis.com

**Tanggal** : 18 Januari 2024

**Ringkasan** : Keputusan pemerintah untuk menunda kenaikan pajak barang dan jasa tertentu, khususnya pajak hiburan, merupakan kabar baik bagi pelaku usaha di sektor pariwisata, terutama yang bergerak di bidang jasa hiburan. Pakar Strategi Pariwisata Nasional, Taufan Rahmadi, menyatakan bahwa keputusan untuk menunda penerapan pajak hiburan ini adalah langkah yang tepat dan bijaksana mengingat sektor pariwisata sedang dalam proses pemulihan setelah terdampak pandemi Covid-19. Luhut menyatakan telah mengadakan pertemuan dengan berbagai instansi terkait, termasuk Gubernur Bali, untuk membahas penerapan pajak hiburan ini. Hasilnya, pemerintah sepakat untuk mengevaluasi Undang-Undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sambil menunggu hasil *judicial review* yang diajukan beberapa asosiasi ke Mahkamah Konstitusi.

Tabel 4.9. Analisis Artikel Berita 9

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Pakar: Penundaan Kenaikan Pajak Hiburan Dapat Genjot Minat Wisatawan
	<b>Lead</b>	Penundaan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan oleh pemerintah membawa kabar baik bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata, khususnya yang bergerak di bidang jasa hiburan.
	<b>Latar Informasi</b>	Keputusan pemerintah terkait penundaan kebijakan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).
	<b>Kutipan Sumber</b>	Taufan Rahmadi (Pakar Strategi Pariwisata Nasional)
		<ol style="list-style-type: none"> <li>"Ini mencerminkan respons cepat pemerintah dalam menanggapi masukan dari masyarakat pelaku industri pariwisata yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut"</li> </ol> <p>Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>"Jadi kita ingin menunda dulu pelaksanaannya karena kebijakan ini sebenarnya berasal dari Komisi XI DPR RI, bukan keputusan mendadak dari pemerintah,"</li> <li>"Saya rasa itu perlu kita pertimbangkan karena perhatian pemerintah terhadap rakyat kecil sangat besar,"</li> </ol>

	<b>Pernyataan Opini</b>	1. Penundaan kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif pada industri hiburan di sektor pariwisata, serta akan mendukung keberlangsungan para pekerja di dalamnya. Selain itu, penundaan kenaikan pajak hiburan dapat meningkatkan minat wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, untuk mengunjungi Indonesia.
<b>Struktur Skrip</b>	<b>Penutup</b>	Artikel ditutup dengan pernyataan kebijakan kenaikan pajak hiburan di DKI Jakarta dan Bali.
	<b>What</b>	Penundaan kenaikan pajak hiburan dinilai sebagai kabar baik bagi para pelaku usaha sektor pariwisata
	<b>Where</b>	Jakarta
	<b>When</b>	18 Januari 2024
<b>Struktur Tematik</b>	<b>Who</b>	Taufan Rahmadi dan Luhut Binsar Pandjaitan
	<b>Why</b>	Keputusan pemerintah menunda kenaikan PBJT
	<b>How</b>	Organisasi Pariwisata Dunia mengajak negara-negara yang pendapatan utamanya berasal dari sektor pariwisata untuk memberikan keringanan pajak kepada para pelakunya.
	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Artikel ini menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menunda keputusan kenaikan PBJT utamanya jasa hiburan. Kemudian paragraf selanjutnya terkait respon dari pemerintah dalam menindaklanjuti tanggapan dari Masyarakat dan pelaku usaha hiburan yang terdampak maupun yang merasa keberatan dengan adanya kebijakan baru tersebut.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat foto ilustrasi sebuah tempat hiburan malam yakni club malam yang terkena dampak kenaikan pajak hiburan. Terdapat kata frasa hukum " <i>judicial review</i> " yakni bermaksud Pemeriksaan terhadap keabsahan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi melalui serangkaian prosedur uji konstitusionalitas dan juga dalam artikel ini terdapat kata yang ditekankan yakni "pajak hiburan" hal ini penulis ingin menonjolkan terkait kebijakan baru yaitu kenaikan pajak.

Sumber: Olahan Peneliti

## Rincian Analisis

### a. Struktur Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis, wartawan ingin menginformasikan penundaan keputusan pemerintah untuk menunda kenaikan pajak barang dan jasa tertentu, khususnya pajak hiburan, merupakan kabar baik bagi pelaku usaha di sektor pariwisata, terutama yang bergerak di bidang jasa hiburan. Lead dan latar informasi menjelaskan hal serupa dengan judul yang dibuat oleh penulis, yakni penundaan keputusan kenaikan PBJT khususnya pajak hiburan. Kutipan sumber yang dicantumkan oleh penulis hanya menegaskan informasi dari judul, lead, dan latar informasi, yakni menunggu respons dari pemerintah terkait menindaklanjuti protes dari masyarakat yang keberatan atas adanya kebijakan tersebut. Artikel ditutup dengan pernyataan kebijakan kenaikan pajak hiburan di DKI Jakarta dan Bali.

### **b. Struktur Skrip**

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yaitu Penundaan kenaikan pajak hiburan dinilai sebagai kabar baik bagi para pelaku usaha sektor pariwisata. Selanjutnya *where* dan *when* yaitu Jakarta, 18 Januari 2024. Lalu, *who* dan *why* yaitu Tufan Rahmadi dan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyampaikan Keputusan pemerintah menunda kenaikan PBJT. Dan *how* yaitu Organisasi Pariwisata Dunia mengajak negara-negara yang pendapatan utamanya berasal dari sektor pariwisata untuk memberikan keringanan pajak kepada para pelaku usahanya.

### **c. Struktur Tematik**

Berdasarkan struktur tematik dalam artikel secara keseluruhan dari awal paragraf hingga paragraf penutup memiliki keterkaitan bagaimana Tufan Rahmadi dan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyampaikan terkait keputusan pemerintah menunda kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Kemudian paragraf selanjutnya terkait respon dari pemerintah dalam menindaklanjuti tanggapan dari Masyarakat dan pelaku usaha hiburan yang terdampak maupun yang merasa keberatan dengan adanya kebijakan baru tersebut.

### **d. Struktur Retoris**

Berdasarkan struktur retorik, Terdapat foto ilustrasi sebuah tempat hiburan malam yakni club malam yang terkena dampak kenaikan pajak hiburan. Terdapat kata frasa hukum "*judicial review*" yakni bermaksud Pemeriksaan terhadap keabsahan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi melalui serangkaian prosedur uji konstitusionalitas dan juga dalam artikel ini terdapat kata yang ditebalkan yakni "pajak hiburan" hal ini penulis ingin menonjolkan terkait kebijakan baru yaitu kenaikan pajak.

## 10. Analisis Artikel Berita 10

**Judul** : Heru Budi Cari Jalan Tengah Polemik Pajak Hiburan 40% di Jakarta

**Sumber** : Bisnis.com

**Tanggal** : 24 Januari 2024

**Ringkasan** : Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan bahwa kebijakan kenaikan pajak hiburan sebesar 40% di Jakarta adalah wewenang pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan dan pertimbangan oleh pemerintah. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa keluhan mengenai kebijakan ini belum menemukan solusi. Selain itu, ia menambahkan bahwa rencana tersebut perlu didiskusikan kembali dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

Tabel 4.10. Analisis Artikel Berita 10

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Heru Budi Cari Jalan Tengah Polemik Pajak Hiburan 40% di Jakarta
	<b>Lead</b>	Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan bahwa kebijakan kenaikan pajak hiburan sebesar 40% di Jakarta adalah otoritas pemerintah pusat.
	<b>Latar Informasi</b>	Heru Budi mengatakan kebijakan kenaikan pajak 40% merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Heru Budi Hartono (Gubernur DKI Jakarta)
	<b>Pernyataan Opini</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "pajak hiburan sudah jelas pernyataan dari pemerintah pusat"</li> <li>2. "Saya sudah mendengar semua keluhan, dan Pemprov DKI pasti akan memberikan solusi terbaik untuk semua pihak. Saat ini, masalah ini sedang dibahas oleh badan pajak,"</li> </ol>
	<b>Penutup</b>	1. Heru mengakui bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mendengarkan keluhan-keluhan dari para pelaku usaha dan telah memahasnya dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Namun, dia menjelaskan bahwa sampai saat ini, belum ada solusi yang ditemukan untuk keluhan tersebut.
Struktur Skrip	<b>What</b>	Artikel ditutup dengan pernyataan penulis terkait tarif pajak hiburan yang berlaku sejak 5 januari 2024.
	<b>Where</b>	Gubernur DKI Jakarta mengatakan kebijakan kenaikan pajak hiburan 40%
	<b>When</b>	Jakarta
	<b>Who</b>	17 Januari 2024
	<b>Why</b>	Heru Budi Hartono (Gubernur DKI Jakarta)
	<b>How</b>	Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengatakan kenaikan pajak hingga 40% sedang dipertimbangkan oleh pemerintah. Heru Budi menjelaskan terkait kenaikan pajak sebesar 40% pemerintah telah mendengarkan keluhan masyarakat dan pasti akan memberikan solusi terbaik untuk semua.

<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Dari awal paragraf hingga akhir saling keterkaitan bagaimana Heru Budi menjelaskan kebijakan kenaikan pajak hiburan 40% yang berasal dari kewenangan dari pemerintah pusat dan dari paragraf pertengahan artikel hingga penutup membahas solusi yang akan diberikan oleh pemerintah dari adanya kebijakan baru tersebut.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat foto Heru Budi selaku Gubernur DKI Jakarta dalam konferensi pers yang membahas upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tepatnya di Balai Kota. Unsur koherensi yaitu kata ganti “dia” yang dimaksud yaitu Heru Budi.

*Sumber: Olahan Peneliti*

## Rincian Analisis

### a. Struktur Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis, wartawan ingin menginformasikan solusi atau jalan tengah dari adanya polemik kenaikan pajak hiburan 40% yang berlaku di Jakarta. Hal ini ditonjolkan pada bagian lead dan latar informasi yakni Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan bahwa kebijakan kenaikan pajak hiburan sebesar 40% di Jakarta adalah otoritas pemerintah pusat. Kutipan sumber yang dicantumkan oleh penulis hanya menegaskan informasi dari judul, lead, dan latar informasi, yakni menunggu solusi yang masih dipertimbangkan oleh pemerintah. Artikel ditutup dengan pernyataan opini dari penulis terkait tarif pajak hiburan yang berlaku sejak 5 Januari 2024.

### b. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yaitu Gubernur DKI Jakarta mengatakan kebijakan kenaikan pajak hiburan 40%. Selanjutnya *where* dan *when* yaitu Jakarta, 17 Januari 2024. Lalu, *who* yaitu Heru Budi Hartono (Gubernur DKI Jakarta), dan *why* yaitu Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengatakan kenaikan pajak hingga 40% sedang dipertimbangkan oleh pemerintah. Dan *how* yaitu Heru Budi menjelaskan terkait kenaikan pajak sebesar 40% pemerintah telah mendengarkan keluhan masyarakat dan pasti akan memberikan solusi terbaik untuk semua.

**c. Struktur Tematik**

Pada struktur Tematik dalam pemberitaan ini secara keseluruhan Dari awal paragraf hingga akhir saling keterkaitan menjelaskan bagaimana Heru Budi menyampaikan informasi pertimbangan pemerintah terkait kebijakan kenaikan pajak hiburan sebesar 40%. Seperti penjelasan, pernyataan, dan kutipan yang disampaikan oleh Heru Budi pada artikel tersebut.

**d. Struktur Retoris**

Pada struktur Retoris, terdapat foto Heru Budi selaku Gubernur DKI Jakarta dalam koferensi pers yang membahas upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tepatnya di Balai Kota. Unsur koherensi yaitu kata ganti “dia” yang dimaksud yaitu Heru Budi.

**11. Analisis Artikel Berita 11**

**Judul** : Hotman Paris-Inul Curhat ke Luhut soal Ada Pemda Sudah Tagih Pajak 40-75%

**Sumber** : Detik.com

**Tanggal** : 26 Januari 2024

**Ringkasan** : Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Hariyadi Sukamdani, bersama dengan penyanyi dangdut Inul Daratista dan pengacara terkenal Hotman Paris, mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan ini membahas mengenai kenaikan pajak barang dan jasa tertentu dalam sektor hiburan yang akan meningkat menjadi 40-75%. Hariyadi menyatakan bahwa pemerintah daerah sudah mulai menagih pajak PBJT dengan tarif baru tersebut, yaitu 40-75%.

Tabel 4.11. Analisis Artikel Berita 11

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Hotman Paris-Inul Curhat ke Luhut soal Ada Pemda Sudah Tagih Pajak 40-75%
	Lead	Hariyadi Sukamdani Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), penyanyi dangdut Inul Daratista, dan pengacara terkenal Hotman Paris mengadakan rapat dengan

<p><b>Latar Informasi</b></p> <p><b>Kutipan Sumber</b></p>	<p>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) pada sektor hiburan menjadi 40-75%. Haryadi menyatakan bahwa pemerintah daerah telah mulai menagih pajak PBJT dengan tarif 40-75%.</p> <p>Haryadi menyebut bahwa pemerintah daerah sudah mulai menagih pajak PBJT sebesar 40-75%.</p> <p>Haryadi Sukamdani (Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia/GIPI)</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Hari ini kami bertemu dengan Pak Menko, Pak Luhut, untuk membahas polemik terkait pajak hiburan. Kami menyampaikan bahwa kami masih menghadapi kendala di lapangan karena pihak pemerintah daerah sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru. Sementara itu, proses di Mahkamah Konstitusi masih berjalan dan tentu akan memakan waktu yang cukup lama."</li> <li>2. "Oleh karena itu, kami meminta bantuan kepada Pak Luhut sebagai Menko yang membawahi bidang kami, mengingat sektor pariwisata berada di bawah naungan beliau sebagai Menko Marves. Kami berharap beliau dapat membantu agar kepala daerah menggunakan kewenangan mereka sesuai dengan Pasal 101 UU No 1 tahun 2022. Pasal tersebut memberikan kepala daerah hak untuk mengeluarkan insentif fiskal, seperti pengurangan tarif pajak dan penghapusan denda."</li> <li>3. "Pak Menko berusaha membantu dengan berkomunikasi dengan kepala daerah agar mereka dapat memahami situasi ini. Jika industri ini bangkrut, yang akan dirugikan adalah masyarakat dan negara. Kami sangat khawatir akan kehilangan banyak pekerjaan, dan kemungkinan besar akan muncul bisnis ilegal karena tarif resmi yang tinggi."</li> </ol> <p>Inul Daratista</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Saya mengikuti pertemuan tertutup kali ini, dan intinya kami meminta panduan dalam masalah ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, terutama sesuai harapan para pemilik bisnis hiburan. Kami berharap segera ada solusi yang baik, karena Pak Luhut dan Mendagri sudah memberikan surat edaran yang menjadi pegangan bagi kami, meskipun mungkin belum cukup kuat. Harapan saya adalah agar kepala daerah memberikan kebijakan langsung. Jadi, sebenarnya masih ada peluang untuk itu."</li> </ol> <p>Hotman Paris</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Surat edaran ini hanya menyalin undang-undang; apa yang tertulis di surat edaran sudah ada dalam undang-undang. Surat edaran ini sebenarnya hanya memberi keberanian kepada Pemda untuk melaksanakan isi undang-undang. Undang-undang menyatakan bahwa mereka berhak untuk tidak mengikuti tarif 40 persen dan bisa kembali ke tarif yang lama. Ini yang saya bacakan dari undang-undang."</li> </ol>
<p><b>Pernyataan Opini</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haryadi menyatakan bahwa banyak pemerintah daerah masih merasa ragu untuk menerapkan Pasal 101 dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang berkaitan dengan penetapan tarif pajak untuk hiburan.</li> <li>2. Inul, penyanyi dangdut, berharap agar perdebatan mengenai pajak hiburan bisa segera diselesaikan. Dia berharap ada keputusan konkret dari pemerintah, bukan hanya surat edaran, terkait wewenang pemerintah daerah dalam memberikan insentif fiskal untuk tarif pajak hiburan.</li> </ol>

	<b>Penutup</b>	Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Hotman Paris yang menyebutkan undang-undang.
<b>Struktur Skrip</b>	<b>What</b>	Rapat para pelaku usaha hiburan terkait penagihan pajak PBJT 40-75%.
	<b>Where</b>	Jakarta
	<b>When</b>	26 Januari 2024
	<b>Who</b>	Hariyadi Sukamdani, Inul Daratista, dan Hotman Paris
	<b>Why</b>	Pemerintah daerah sudah menagih pajak PBJT khususnya pajak hiburan 40-75%
	<b>How</b>	Luhut menyampaikan bahwa polemik kenaikan pajak hiburan terdapat kendala dan pemerintah daerah sudah mengeluarkan tagihan tarif yang sedang di proses di MK.
<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Artikel ini menginformasikan keluhan serta respons pelaku usaha hiburan terkait kebijakan kenaikan pajak hiburan hingga 40-75%. Kemudian dalam artikel ini juga terdapat kutipan para narasumber yang menjelaskan proses Panjang terkait kebijakan tersebut yang diserahkan ke MK.
	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat foto wawancara yang memperlihatkan Haryadi Sukamdani, rombongan Inul dan Hotman Paris usai rapat dengan Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia). Selain itu dalam artikel ini juga terdapat kata yang ditekankan yakni “pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) khusus jasa hiburan” disini penulis ingin menonjolkan permasalahan yang terjadi akibat adanya kenaikan pajak hiburan.
<b>Struktur Retoris</b>		

Sumber: *Olahan Peneliti*

## Rincian Analisis

### a. Struktur Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis, wartawan ingin menginformasikan para pelaku usaha hiburan yakni inul daratista, Hotman Paris, dan Ketua GIPI terkait pemerintah sudah mengeluarkan tagihan pajak PBJT khususnya pajak hiburan yang naik hingga 40-75%, hal itu selaras dengan *lead* dan latar informasi dalam artikel. Penulis artikel tersebut memasukkan referensi dari pihak terkait dalam teksnya, yakni para pelaku usaha di sektor hiburan yang terdampak kebijakan tersebut. Melalui kutipan sumber yang dicantumkan, penulis ingin menyampaikan proses kebijakan baru kenaikan PBJT yang masih di pertimbangkan oleh pemerintah daerah yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

### b. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yaitu Rapat para pelaku usaha hiburan terkait penagihan pajak PBJT 40-75%. Selanjutnya *where* dan *when* yaitu Jakarta, 26 Januari 2024. Lalu, *who* yaitu Haryadi Sukamdani, Inul Daratista, dan

Hotman Paris dan *why* yakni pemerintah daerah sudah menagih pajak PBJT khususnya pajak hiburan 40-75%. Dan *how* yaitu Luhut menyampaikan bahwa polemik kenaikan pajak hiburan terdapat kendala dan pemerintah daerah sudah mengekuarkan tagihan tarif yang sedang di proses di MK.

**c. Struktur Tematik**

Berdasarkan struktur tematik, secara keseluruhan dalam artikel ini ingin menyampaikan proses yang cukup Panjang dalam menetapkan kebijakan kenaikan PBJT khususnya pajak hiburan hingga 40-75%. Penulisan juga menggambarkan seberapa lama proses tersebut memakan waktu yang cukup Panjang dengan adanya polemik pajak hiburan yang terjadi.

**d. Struktur Retoris**

- Berdasarkan struktur retoris, Terdapat foto wawancara yang memperlihatkan Haryadi Sukamdani, rombongan Inul dan Hotman Paris usai rapat dengan Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia). Selain itu dalam artikel ini juga terdapat kata yang ditebalkan yakni “pajak barang dan juga jasa tertentu (PBJT) khusus jasa hiburan” disini penulis ingin menonjolkan permasalahan yang terjadi akibat adanya kenaikan pajak hiburan.

**12. Analisis Artikel Berita 12**

**Judul** : Pajak Hiburan 40-75%, Sandiaga: WA dan DM Saya Meledak!

**Sumber** : Detik.com

**Tanggal** : 22 Januari 2024

**Ringkasan** : Peningkatan tarif pajak untuk sejumlah bisnis hiburan tertentu sebagai Pajak Barang Jasa Tertentu telah menimbulkan kegemparan di kalangan pengusaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tarif pajak untuk sektor hiburan tertentu ditetapkan pada kisaran 40-75%. Menyikapi hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga

Uno, mengungkapkan bahwa banyak pengusaha, termasuk pemilik tempat karaoke Inul Vizta, Inul Daratista, dan pengusaha terkenal sekaligus pengacara, Hotman Paris telah menghubunginya untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terkait kebijakan baru pajak hiburan yang naik drastis.

Tabel 4.12. Analisis Artikel Berita 12

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul Lead</b>	Pajak Hiburan 40-75%, Sandiaga: WA dan DM Saya Meledak! Kenaikan tarif pajak untuk sejumlah bisnis hiburan tertentu sebagai bagian dari Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) telah menciptakan kekhawatiran di kalangan pengusaha. Melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), tarif pajak untuk sektor hiburan tertentu telah ditetapkan berkisar antara 40 hingga 75%.
	<b>Latar Informasi</b>	Kenaikan pajak hiburan menimbulkan konflik antar Menparekraf dan para pelaku usaha.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Sandiaga Uno (Menparekraf) <ol style="list-style-type: none"> <li>"Ini yang membuat kotak masuk pesan singkat dan pesan langsung saya menjadi begitu ramai! Mendapatkan laporan dari Bang Hotman dan Mbak Inul."</li> <li>"Selain itu, lebih independen dalam mengelola pendapatan negara dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat."</li> </ol> <p>Lydia Kurniawati Christyana (Direktur Pajak Daerah &amp; Retribusi Daerah Kementerian Keuangan)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>"Terutama untuk yang menduduki urutan ke-12 tadi, seperti bar, klub malam, tempat karaoke, serta layanan spa dan sauna, karena termasuk dalam kategori hiburan tertentu, tarif khusus akan diberlakukan."</li> </ol> <p>Inul Daratista (pelaku usaha hiburan karaoke)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>"Pajak hiburan naik dari 25% menjadi 40-75%, membuat aturan baru akan menimbulkan keresahan!"</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sejatinya, tujuan dari UU tersebut adalah positif, yaitu untuk mendorong desentralisasi fiskal dan memberikan kelonggaran kepada pemerintah daerah agar dapat menyesuaikan kebijakan dengan kondisi yang ada di wilayahnya.</li> </ol>
	<b>Penutup</b>	Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Inul Daratista yang tidak setuju adanya kenaikan pajak hiburan yang tadinya 25% naik hingga 40-75%
Struktur Skrip	<b>What</b>	Sandiaga Uno yang dibanjiri protes atas kenaikan pajak hiburan 40-75%
	<b>Where</b>	Jakarta
	<b>When</b>	22 Januari 2024
	<b>Who</b>	Sandiaga Uno, Lydia Kurniawati Christyana, dan Inul Daratista
	<b>Why</b>	Kenaikan pajak hiburan membuat para pengusaha heboh dan langsung menghubungi Sandiaga Uno selaku Menparekraf.
	<b>How</b>	Sandiaga Uno menanggapi persoalan ini langsung memberikan jawaban dan menginformasikan kepada para pengusaha bahwa pemerintah akan memberikan fleksibilitas atas situasi yang terjadi.
Struktur Tematik	<b>Paragraf, proposisi kalimat,</b>	Artikel berisi informasi terkait para pengusaha yang heboh dengan adanya kenaikan pajak hingga 40-75%. Kemudian paragraf selanjutnya Sandiaga Uno menanggapi persoalan

	<b>hubungan antar kalimat</b>	tersebut dengan memberikan penjelasan kepada para pengusaha, selain kalangan pengusaha, artis, perhimpunan hotel dan restoran Indonesia juga turut implementasi kebijakan baru tersebut.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat gambar Sandiaga Uno selaku menparekraf yang menanggapi persoalan tersebut, foto tersebut menggambarkan Sandiaga sedang memberikan tanggapan dalam konferensi pers. Selain itu dalam artikel terdapat kata frasa daerah kutipan Inul yakni kata “sing nggawe” dan “modyar tah!!!!”

Sumber: Olahan Peneliti

## Rincian Analisis

### a. Struktur Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis, wartawan ingin menginformasikan Kenaikan tarif pajak untuk sejumlah bisnis hiburan tertentu sebagai bagian dari Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) telah menciptakan kekhawatiran di kalangan pengusaha. Melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (HKPD), tarif pajak untuk sektor hiburan tertentu telah ditetapkan berkisar antara 40 hingga 75%, hal itu selaras dengan *lead* dan latar informasi dalam artikel. Penulis dalam artikel mencantumkan sumber dari pihak terkait yakni Sandiaga Uno (Menparekraf), Lydia Kurniawati Christyana (Direktur Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kementerian Keuangan), dan Inul Daratista salah satu pengusaha di sektor hiburan. Kemudian, artikel tersebut ditutup dengan kutipan dari Inul Daratista yang tidak setuju adanya kenaikan pajak hiburan yang tadinya 25% naik hingga 40-75%.

### b. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yaitu Sandiaga Uno yang dibanjiri protes atas kenaikan pajak hiburan 40-75%. Selanjutnya *where* dan *when* yaitu Jakarta, 22 Januari 2024. Lalu, *who* dan *why* yaitu Sandiaga Uno (Menparekraf), Lydia Kurniawati Christyana (Direktur Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kementerian Keuangan), dan Inul Daratista terkait kenaikan pajak hiburan membuat para pengusaha heboh dan langsung menghubungi Sandiaga Uno selaku Menparekraf. Dan *how* yaitu Sandiaga Uno menanggapi persoalan ini langsung memberikan jawaban dan menginformasikan kepada para

pengusaha bahwa pemerintah akan memberikan fleksibilitas atas situasi yang terjadi.

**c. Struktur Tematik**

Berdasarkan struktur tematik dalam artikel secara keseluruhan dari awal paragraf hingga paragraf penutup memiliki keterkaitan bagaimana kalangan pengusaha, artis, dan PHRI ikut serta dengan adanya konflik yang terjadi terkait kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan 40-75%. Hal tersebut menimbulkan konflik dan perdebatan para pengusaha dan tanggapan dari Menparekraf.

**d. Struktur Retoris**

Berdasarkan struktur retoris, dalam artikel ini terdapat gambar Sandiaga Uno selaku menparekraf yang menanggapi persoalan tersebut, foto tersebut menggambarkan Sandiaga sedang memberikan tanggapan dalam konferensi pers. Selain itu dalam artikel terdapat kata frasa daerah kutipan Inul yakni kata “sing nggawe” dan “modyar tah!!!!” yang bermaksud akan mematikan aktivitas usaha hiburan.

**13. Analisis Artikel Berita 13**

**Judul** : PHRI DIY Sindir Kenaikan Pajak Hiburan: Kenapa Nggak 100% Sekalian?

**Sumber** : Detik.com

**Tanggal** : 17 Januari 2024

**Ringkasan** : Pemerintah mengumumkan kenaikan pajak hiburan untuk tempat-tempat seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan layanan spa sebesar 40 hingga 75 persen. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan tanggapan tajam terhadap kebijakan tersebut.

Tabel 4.13. Analisis Artikel Berita 13

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	PHRI DIY Sindir Kenaikan Pajak Hiburan: Kenapa Nggak 100% Sekalian?
	<b>Lead</b>	Pemerintah telah meningkatkan tarif pajak untuk tempat hiburan seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan layanan spa sebesar 40 hingga 75 persen. PHRI DIY memberikan respons yang tajam terhadap keputusan tersebut.
	<b>Latar Informasi</b>	Pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan karaoke, diskotek, mandi uap dan bar hingga 40-75%
	<b>Kutipan Sumber</b>	Deddy Pranowo Eryono (Ketua PHRI DIY) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Mengapa hanya meningkatkan sebesar 40 hingga 75 persen? Mengapa tidak langsung 100 persen saja? Lebih baik jika tarif dinaikkan menjadi 100 persen agar industri pariwisata kita langsung mati saja,"</li> <li>2. "Kita juga tidak tahu dasar apa yang mendasari kenaikan ini. Di mana analisis akademiknya?"</li> <li>3. "Itu juga akan berdampak negatif bagi Indonesia, karena sementara itu, negara lain justru menurunkan tarif pajak untuk menarik kunjungan wisatawan. Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina justru memangkas tarif pajak mereka. Selain itu, beban biaya bagi konsumen di negara-negara tersebut juga tidak begitu tinggi," ujar seseorang dengan keprihatinan.</li> <li>4. "Harapannya, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menyetujui kebijakan tersebut, bahkan bisa saja menolak untuk menerapkannya. Hal ini tentunya tergantung pada kebijakan daerah," ujar seseorang dengan harapan.</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan ini sangat kontradiktif dari perencanaan Kemenparekraf terkait kenaikan jumlah wisatawan lokal maupun internasional.</li> <li>2. PHRI pusat telah menyampaikan keberatannya kepada kementerian. Dia mengungkapkan kemungkinan untuk mengajukan permohonan <i>judicial review</i>.</li> </ol>
	<b>Penutup</b>	Artikel ditutup dengan informasi tambahan oleh penulis yang menyampaikan penetapan PBJT mulai Januari 2024 yang tertuang dalam UU No 1 tahun 2022.
Struktur Skrip	<b>What</b>	PHRI DIY sindir pemerintah terkait kenaikan tarif pajak hiburan hingga 40-75%
	<b>Where</b>	Jogja
	<b>When</b>	17 Januari 2024
	<b>Who</b>	Deddy Pranowo Eryono
	<b>Why</b>	PHRI Yogyakarta memprotes pemerintah terkait kebijakan kenaikan pajak hingga 40-75%.
Struktur Tematik	<b>How</b>	Deddy Pranowo selaku PHRI menyatakan keberatan pada kementerian dan meminta peluang <i>judicial review</i> .
	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Artikel berisi informasi pemerintah menetapkan tarif kenaikan pajak yang menimbulkan konflik, salah satunya PHRI Deddy Pranowo tidak setuju adanya kenaikan pajak hiburan hingga 40-75% tersebut. Kemudian pada paragraf selanjutnya membahas mengenai peraturan yang ditetapkan belum jalan atas dasar apa dan tanpa adanya sosialisasi maupun asosiasi terlebih dulu.
	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat foto tugu Pal Putih yaitu salah satu ikon wisata di Jogja Malioboro yang merupakan tempat para pariwisata juga terdampak kenaikan pajak hiburan. Pada unsur kata terdapat "komentar pedas" yang bersifat sensasional pada artikel tersebut.
Struktur Retoris		

Sumber: Olahan Peneliti

## Rincian Analisis

### a. Struktur Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis, wartawan ingin menginformasikan terkait pemerintah yang telah menetapkan tarif kenaikan pajak hiburan untuk tempat-tempat seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan layanan spa sebesar 40% hingga 75%. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan tanggapan tajam terhadap kebijakan tersebut. hal itu selaras dengan *lead* dan latar informasi dalam artikel. Penulis dalam artikel mencantumkan sumber dari pihak terkait yakni Deddy Pranowo Eryono selaku Ketua PHRI DIY. Artikel ditutup dengan informasi tambahan oleh penulis yang menyampaikan penetapan PBJT mulai Januari 2024 yang tertuang dalam UU No 1 tahun 2022.

### b. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yaitu PHRI DIY sendiri pemerintah terkait kenaikan tarif pajak hiburan hingga 40-75%. Selanjutnya *where* dan *when* yaitu Jakarta, 17 Januari 2024. Lalu, *who* dan *why* yaitu Deddy Pranowo Eryono (Ketua PHRI DIY) memprotes pemerintah terkait kebijakan kenaikan pajak hingga 40-75%. Dan *how* yaitu Deddy Pranowo selaku PHRI menyatakan keberatan pada kementerian dan meminta peluang judicial review. Hal yang ditonjolkan dalam artikel ini adalah putusan pemerintah dengan menetapkan kebijakan baru tersebut yang membuat banyak konflik di berbagai kalangan.

### c. Struktur Tematik

Berdasarkan struktur tematik dalam artikel secara keseluruhan dari awal paragraf hingga paragraf penutup memiliki keterkaitan bagaimana kebijakan baru dari pemerintah tersebut memunculkan konflik dan tanggapan tajam dari Deddy Pranowo selaku PHRI. Kemudian pada paragraf selanjutnya membahas mengenai peraturan yang ditetapkan belum jalan atas dasar apa dan tanpa adanya sosialisasi maupun asosiasi terlebih dulu.

**d. Struktur Retoris**

Berdasarkan struktur retorik, terdapat foto tugu Pal Putih yaitu salah satu ikon wisata di Jogja Malioboro yang merupakan tempat para pariwisata juga terdampak kenaikan pajak hiburan. Pada unsur kata terdapat “komentar pedas” yang bersifat sensasional pada artikel tersebut.

**14. Analisis Artikel Berita 14**

**Judul** : Pengusaha Minta MK Hapus Pajak Hiburan 75% untuk Diskotek hingga Spa

**Sumber** : Detik.com

**Tanggal** : 15 Maret 2024

**Ringkasan** : Kelompok Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia mengajukan gugatan terhadap aturan soal Pajak Barang dan Jasa Tertentu minimal 40% dan maksimal 75% dihapus. GIPI meminta tarif PBJT paling tinggi 10%. Hal ini disampaikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang digelar Kamis . Gugatan GIPI tersebut terdaftar pada nomor perkara 32/PUU-XXII/2024. Pemohon juga menyebut norma pasal bersifat diskriminatif terkait pengenaan tarif pajak hiburan tertentu. Sementara, Para Pemohon, karaoke, klub malam, diskotek bar, dan mandi uap/spa ialah nama jenis usaha hiburan bersifat umum yang tidak identik diklaim bersifat mewah.

Tabel 4.14. Analisis Artikel Berita 14

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Pengusaha Pengusaha Minta MK Hapus Pajak Hiburan 75% untuk Diskotek hingga Spa
	<b>Lead</b>	Dewan Pengurus Pusat dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI) telah mengajukan gugatan terhadap aturan terkait Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) minimal 40% dan maksimal 75% dihapus. GIPI telah meminta tarif PBJT paling tinggi 10%.
	<b>Latar Informasi</b>	DPP GIPI mengajukan gugatan terkait kebijakan pajak barang dan jasa tertentu yang meningkat 40% dengan maksimal 75% agar dihapus.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Muhammad Joni (Kuasa Hukum Pemohon)
		1. "Saya memohon agar Pasal 58 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dihapuskan, sehingga Pasal

		58 ayat (1) dari undang-undang tersebut dapat diberlakukan."
		2. "Perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap lima jenis pajak hiburan tertentu telah menyebabkan kerugian materiil dan merugikan kepentingan konstitusional dari para pemohon."
		Enny Nurbaningsih (Hakim Konstitusi)
		1. "Permohonan akan dibahas dan disampaikan pada Rapat Permusyawaratan Hakim
<b>Struktur Skrip</b>	<b>Pernyataan Opini</b>	1. Para pihak yang mengajukan permohonan mengaku mengalami kerugian secara konstitusional karena penerapan pajak pada tempat hiburan seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan spa, dengan tarif mulai dari 40% hingga 75%.
	<b>Penutup</b>	Artikel ini ditutup dengan pernyataan dari Enny Nurbaningsih selaku Hakim Konstitusi Permohonan penghapusan Pajak Hiburan 75% kepada MK Jakarta
<b>Struktur Tematik</b>	<b>What</b>	Jumat, 15 Maret 2024
	<b>Where</b>	Muhammad Joni dan Enny Nurbaningsih
	<b>Who</b>	DPP GIPI dan para pengusaha meminta penghapusan kebijakan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu kepada MK.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Why</b>	Permohonan pengusaha yang mewakili 6 (enam) badan hukum bidang pariwisata dan hiburan, mengalami kerugian konstitusional akibat kebijakan kenaikan pajak hiburan paling rendah 40% dan maksimal 75%.
	<b>How</b>	Dalam artikel ini tiap paragraf menginformasikan permohonan para pelaku usaha yang terkena dampak kenaikan pajak hiburan kepada MK agar dapat menghapus kebijakan baru tersebut. Kemudian dalam artikel ini juga menuliskan pasal yang berkaitan serta solusi terkait kenaikan pajak hiburan yang terjadi.
	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Penggunaan foto pada artikel ini yang menggambarkan gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Juga terdapat kata "pemohon" yang digunakan oleh penulis yang diartikan sebagai istilah dari "pengusaha". Selain itu terdapat kata yang ditebalkan oleh penulis yakni "pajak" hal ini penulis ingin menonjolkan terkait pembahasan isi dari artikel tersebut yang membahas protes adanya kenaikan pajak kenaikan hiburan.
	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	

Sumber: *Olahan Peneliti*

## Rincian Analisis

### a. Struktur Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis, wartawan ingin menginformasikan terkait permohonan para pengusaha kepada MK yang terkena dampak kenaikan pajak hiburan. Artikel ini diberi judul "Pengusaha Pengusaha Minta MK Hapus Pajak Hiburan 75% untuk Diskotek hingga Spa", artikel tersebut juga menyampaikan isi dari sidang MK terkait permohonan para pengusaha agar kebijakan kenaikan pajak hiburan dihapus karena mengakibatkan kerugian

konstitusional, hal itu selaras dengan *lead* dan latar informasi dalam artikel. Penulis dalam artikel mencantumkan sumber dari pihak terkait, yaitu Muhammad Joni (Kuasa Hukum Pemohon) dan Enny Nurbaningsih (Hakim Konstitusi). Melalui kutipan sumber, penulis dapat memberikan informasi secara seimbang tiap paragraf. Selain itu, artikel tersebut ditutup dengan kutipan pernyataan dari Enny Nurbaningsih selaku Hakim Konstitusi. Melalui elemen-elemen pada struktur sintaksis, penulis berfokus pada permohonan para pengusaha yang meminta MK untuk menghapus kebijakan pajak hiburan 75%.

**b. Struktur Skrip**

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yaitu Permohonan penghapusan Pajak Hiburan 75% kepada MK. Selanjutnya *where* dan *when* yaitu Jakarta, 15 Maret 2024. Lalu, *who* yaitu para pengusaha Muhammad Joni (Kuasa Hukum Pemohon) dan Enny Nurbaningsih (Hakim Konstitusi), dan *why* yakni DPP GIPI dan para pengusaha meminta penghapusan kebijakan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu kepada MK. Dan *how* yaitu Permohonan pengusaha yang mewakili 6 (enam) badan hukum bidang pariwisata dan hiburan, mengalami kerugian konstitusional akibat kebijakan kenaikan pajak hiburan paling rendah 40% dan maksimal 75%. Penulis dalam artikel ini bersifat informasi yang ditekankan pada informasi permohonan para pengusaha kepada MK agar segera menghapus kebijakan kenaikan pajak hiburan.

**c. Struktur Tematik**

Berdasarkan struktur tematik dalam artikel secara keseluruhan dari awal paragraf hingga paragraf penutup memiliki keterkaitan bagaimana pemohon atau yang dimaksud dalam artikel tersebut ialah para “pengusaha” yang mengalami kerugian konstitusional dan mengajukan gugatan kepada DPP GIPI terkait kenaikan pajak hiburan minimal 40% dan maksimal 75%. Seperti pernyataan pendapat, penjelasan, dan penyebab permohonan yang

digugat. Kemudian dalam artikel ini juga menuliskan pasal yang berkaitan serta solusi terkait kenaikan pajak hiburan yang terjadi.

**d. Struktur Retoris**

Berdasarkan struktur retorik, artikel ini memuat foto gedung Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggambarkan isi artikel tersebut membahas terkait MK. Juga terdapat kata “pemohon” yang digunakan oleh penulis yang diartikan sebagai istilah dari “pengusaha”. Selain itu terdapat kata yang ditekankan oleh penulis yakni “pajak” hal ini penulis ingin menonjolkan terkait pembahasan isi dari artikel tersebut yang membahas protes adanya kenaikan pajak kenaikan hiburan.

**15. Analisis Artikel Berita 15**

- Judul** : Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan Ditunda, Siapkan Uji Materi ke MK
- Sumber** : Detik.com
- Tanggal** : 17 Januari 2024
- Ringkasan** : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan bahwa menaikkan pajak hiburan sebesar 40-75% tidak memiliki alasan yang kuat. Dia meminta agar kenaikan tersebut ditunda. Banyak orang yang mengandalkan industri hiburan sebagai sumber penghidupan, dan menurut Luhut, tidak ada kebutuhan mendesak untuk menaikkan pajak tersebut. Lebih lanjut, kebijakan ini juga akan berdampak pada banyak pedagang kecil.

Tabel 4.15. Analisis Artikel Berita 15

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan Ditunda, Siapkan Uji Materi ke MK
	<b>Lead</b>	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan bahwa menaikkan pajak hiburan sebesar 40-75% tidak memiliki dasar yang kuat. Ia meminta penundaan dalam penerapan kenaikan pajak tersebut.
	<b>Latar Informasi</b>	Tanggapan Luhut Panjaitan terkait kenaikan pajak hiburan agar ditunda dan perlu dievaluasi
	<b>Kutipan Sumber</b>	Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman)

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Saya sepenuhnya mendukung penundaan itu, dan menurut saya, tidak ada justifikasi yang membenarkan kenaikan pajak dari sana," ujar Luhut.</li> <li>2. "Jadi, sebenarnya itu berasal dari Komisi XI DPR RI, bukan langsung dari pemerintah. Sehingga, keputusan tersebut tidak datang secara tiba-tiba. Kami telah memutuskan untuk mengevaluasi langsung, dan kemudian juga mengajukan <i>judicial review</i> ke Mahkamah Konstitusi," jelasnya.</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salah satu argumen yang mereka kemukakan adalah bahwa undang-undang yang berkaitan dengan pajak hiburan bukanlah berasal dari inisiatif pemerintah, tetapi dari Komisi XI DPR RI. Karena itu, mereka berencana untuk mengajukan permohonan <i>judicial review</i> ke MK</li> </ol>
<b>Struktur Skrip</b>	<b>Penutup</b>	Artikel ditutup dengan kutipan dari Luhut Panjaitan
	<b>What</b>	Luhut Binsar Panjaitan meminta kebijakan kenaikan pajak hiburan ditunda dan diadakan <i>judicial review</i> ke MK.
	<b>Where</b>	Solo
	<b>When</b>	17 Januari 2024
	<b>Who</b>	Luhut Binsar Panjaitan
	<b>Why</b>	Kebijakan kenaikan pajak hiburan menimbulkan tanggapan dari Luhut Panjaitan
	<b>How</b>	Adanya tanggapan dari Luhut selaku Koordinator Bidang Kemaritiman, pemerintah harus mendengarkan tanggapan tersebut terutama banyak pedagang kecil yang ikut terdampak dengan adanya kebijakan baru tersebut.
<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Dalam artikel ini tiap paragraf menginformasikan tanggapan Luhut Panjaitan yang meminta kebijakan baru tersebut ditunda dan dievaluasi. Agar tidak menimbulkan kerugian untuk berbagai pihak terutama pedagang kecil. Paragraf selanjutnya membahas adanya pengajuan <i>judicial review</i> ke MK.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat foto Luhut Pandjaitan selaku Menko Marves yang memberikan tanggapan sekaligus mengurus adanya konflik kenaikan pajak tersebut. Terdapat kata frasa hukum " <i>judicial review</i> " yakni bermaksud Pemeriksaan terhadap keabsahan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi melalui serangkaian prosedur uji konstitusionalitas.

Sumber: Olahan Peneliti

## Rincian Analisis

### a. Struktur Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis, wartawan ingin menginformasikan tanggapan yang diberikan oleh Luhut Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengungkapkan bahwa menaikkan pajak hiburan sebesar 40-75% tidak memiliki alasan yang kuat. Luhut meminta agar kenaikan tersebut ditunda. Banyak orang yang mengandalkan industri hiburan sebagai sumber penghidupan, dan menurut Luhut, tidak ada kebutuhan mendesak untuk menaikkan pajak tersebut dan kebijakan ini juga akan berdampak pada banyak pedagang kecil, hal itu selaras dengan *lead* dan latar informasi dalam artikel. Penulis dalam artikel mencantumkan sumber dari pihak terkait, yaitu Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman. Artikel tersebut ditutup dengan kutipan pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan.

**b. Struktur Skrip**

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yaitu Luhut Binsar Panjaitan meminta kebijakan kenaikan pajak hiburan ditunda dan diadakan *judicial review* ke MK. Selanjutnya *where* dan *when* yaitu Solo, 17 Januari 2024. Lalu, *who* dan *why* yaitu Luhut Binsar Panjaitan, terkait Kebijakan kenaikan pajak hiburan menimbulkan tanggapan dari Luhut Panjaitan. Dan *how* yaitu Adanya tanggapan dari Luhut selaku Koordinator Bidang Kemaritiman, pemerintah harus mendengarkan tanggapan tersebut terutama banyak pedagang kecil yang ikut terdampak dengan adanya kebijakan baru tersebut.

**c. Struktur Tematik**

Berdasarkan struktur tematik dalam artikel secara keseluruhan dari awal paragraf hingga paragraf penutup memiliki keterkaitan bagaimana menginformasikan tanggapan Luhut Panjaitan yang meminta kebijakan baru tersebut ditunda dan dievaluasi. Agar tidak menimbulkan kerugian untuk berbagai pihak terutama pedagang kecil. Paragraf selanjutnya membahas adanya pengajuan *judicial review* ke MK.

**d. Struktur Retoris**

Terdapat foto Luhut Pandjaitan selaku Menko Marves yang memberikan tanggapan sekaligus mengurus adanya konflik kenaikan pajak tersebut. Terdapat kata frasa hukum "*judicial review*" yakni bermaksud Pemeriksaan terhadap keabsahan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi melalui serangkaian prosedur uji konstitusionalitas.

## 16. Analisis Artikel Berita 16

**Judul** : 3 Menteri Diutus Jokowi Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Pajak Hiburan

**Sumber** : Detik.com

**Tanggal** : 8 Februari 2024

**Ringkasan** : Pengusaha mengajukan gugatan terhadap kenaikan pajak hiburan dari 40% menjadi 75% yang dilakukan pemerintah. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyatakan bahwa pemerintah telah mendapatkan surat kuasa dari Presiden untuk menghadapi masalah ini. Sandiaga Uno juga mengatakan bahwa pemerintah sedang mendorong pemerintah daerah untuk memberikan insentif kepada pengusaha sebagai bentuk keringanan pajak, sesuai dengan arahan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Sandiaga menyebutkan bahwa beberapa daerah, seperti Bali dan Labuan Bajo, sudah memberlakukan keringanan pajak bagi pengusaha hiburan.

Tabel 4.16. Analisis Artikel Berita 16

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	3 Menteri Diutus Jokowi Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Pajak Hiburan
	<b>Lead</b>	Sejumlah pengusaha menggugat kenaikan pajak hiburan dari 40% menjadi 75% yang diterapkan oleh pemerintah, dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Presiden Jokowi telah menugaskan tiga menteri untuk menghadapi gugatan tersebut.
	<b>Latar Informasi</b>	Tarif pajak hiburan dinaikan pemerintah hingga 40-45%, para pengusaha menggugat kebijakan tersebut.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Sandiaga Uno (Menparekraf) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menerima surat kuasa dari Presiden (Jokowi) untuk menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tiga kementerian yang akan bertanggung jawab dalam menghadapi gugatan tersebut adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).</li> <li>2. Kami telah memutuskan bahwa pemerintah daerah diarahkan untuk memberikan insentif guna mengurangi beban yang dirasakan oleh pengusaha.</li> <li>3. Sejumlah daerah seperti Bali dan Labuan Bajo telah mengambil langkah penyesuaian. Banyak pemerintah daerah lainnya juga telah melakukan penyesuaian serupa.</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurutnya beberapa daerah, termasuk Bali dan Labuhan Bajo, telah memberlakukan kebijakan pengurangan pajak hiburan bagi para pengusaha lokal di wilayah mereka masing-masing.</li> </ol>
	<b>Penutup</b>	Artikel ditutup dengan informasi tambahan dari penulis terkait undang-undang kebijakan tersebut.

<b>Struktur Skrip</b>	<b>What</b>	3 menteri diutus presiden untuk menangani gugatan para pengusaha yang protes terkait kenaikan tarif pajak hiburan 40-75%.
	<b>Where</b>	Jakarta
	<b>When</b>	7 Februari 2024
	<b>Who</b>	Sandiaga Uno dan Presiden Joko Widodo
	<b>Why</b>	Pengusaha mengajukan gugatan ke MK terkait kebijakan kenaikan pajak hiburan.
	<b>How</b>	Adanya kebijakan baru tersebut yang membuat pro kontra, pemerintah menyampaikan akan memberikan insentif bagi para pengusaha sebagai bentuk keringanan.
<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Dalam artikel ini tiap paragraf menginformasikan tanggapan dari Sandiaga Uno dalam menghadapi gugatan terkait kebijakan baru yang menimbulkan konflik. Kemudian, pada paragraf selanjutnya menginformasikan bahwa Pemda telah membuat surat edaran terkait pengusaha akan mendapatkan insentif untuk meringankan kenaikan tarif pajak hiburan.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat foto Sandiaga Uno selaku Menparekraf sedang pres conferens 2024. Selain itu dalam artikel ini terdapat informasi tambahan berupa video yang berjudul “Sandiaga Yakin Bahwa Kenaikan Pajak Hiburan-Alkohol Tak Pengaruhi Para Wisatawan” video tersebut menyatakan bahwa Sandiaga optimis adanya kenaikan pajak hiburan tidak berdampak negatif bagi para wisatawan.

Sumber: *Olahan Peneliti*

## Rincian Analisis

### a. Struktur Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis, wartawan ingin menginformasikan Pengusaha mengajukan gugatan terhadap kenaikan pajak hiburan dari 40% menjadi 75% yang dilakukan pemerintah. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyatakan bahwa pemerintah telah mendapatkan surat kuasa dari Presiden untuk menghadapi masalah ini. Sandiaga Uno juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang mendorong pemerintah daerah untuk memberikan insentif kepada pengusaha sebagai bentuk keringanan pajak, hal itu selaras dengan *lead* dan latar informasi dalam artikel. Penulis dalam artikel mencantumkan sumber dari pihak terkait, yaitu Sandiaga Uno dan Presiden Joko Widodo. Melalui kutipan sumber, penulis dapat memberikan informasi secara seimbang. Artikel tersebut ditutup dengan informasi tambahan dari penulis terkait undang-undang kebijakan tersebut.

### b. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yaitu 3 menteri diutus presiden untuk menangani

gugatan para pengusaha yang protes terkait kenaikan tarif pajak hiburan 40-75%. Selanjutnya *where* dan *when* yaitu Jakarta, 7 Februari 2024. Lalu, *who* yaitu Sandiaga Uno dan Presiden Joko Widodo, dan *why* yakni Pengusaha mengajukan gugatan ke MK terkait kebijakan kenaikan pajak hiburan. Kemudian *how* yaitu Adanya kebijakan baru tersebut yang membuat pro kontra, pemerintah menyampaikan akan memberikan insentif bagi para pengusaha sebagai bentuk keringanan.

**c. Struktur Tematik**

Berdasarkan struktur tematik dalam artikel secara keseluruhan dari awal paragraf hingga paragraf penutup memiliki keterkaitan bagaimana penulis menyampaikan bahwa dari adanya kebijakan baru tersebut, menimbulkan protes dari para pengusaha sektor hiburan dan juga tanggapan dari Menparekraf Sandiaga Uno, dan Pemda yang memberikan keringanan bagi para pengusaha dengan adanya insentif.

**d. Struktur Retoris**

Berdasarkan struktur retoris, pada artikel ini menampilkan foto Sandiaga Uno, foto tersebut menggambarkan Sandiaga Uno selaku Menparekraf sedang melakukan pres konferens 2024. Selain itu dalam artikel ini terdapat informasi tambahan berupa video yang berjudul “Sandiaga Yakin Bahwa Kenaikan Pajak Hiburan-Alkohol Tak Pengaruhi Para Wisatawan” video tersebut menyatakan bahwa Sandiaga optimis adanya kenaikan pajak hiburan tidak berdampak negatif bagi para wisatawan.

**17. Analisis Artikel Berita 17**

**Judul** : Ni Luh Djelantik Minta Sri Mulyani ke Bali Buntut Pajak Hiburan 40-75%

**Sumber** : Detik.com

**Tanggal** : 22 Januari 2024

**Ringkasan** : Ni Luh Putu Ary Pertama Djelantik mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan pertemuan di Bali dengan para

pengusaha di industri spa dan hiburan. Ini dilakukan sebagai respons terhadap kenaikan tarif pajak untuk beberapa bisnis hiburan menjadi 40-75%. Sri Mulyani diundang ke Bali untuk mendengarkan langsung keluhan dari masyarakat.

Tabel 4.17. Analisis Artikel Berita 17

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Ni Luh Djelantik Minta Sri Mulyani ke Bali Buntut Pajak Hiburan 40-75%
	<b>Lead</b>	Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik mengajukan permintaan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melakukan pertemuan di Bali dengan para pengusaha di sektor spa dan hiburan. Permintaan ini muncul setelah terjadinya kenaikan tarif pajak untuk beberapa bisnis hiburan menjadi 40-75%.
	<b>Latar Informasi</b>	Permintaan salah satu pengusaha di sektor hiburan meminta Sri Mulyani Menteri Keuangan bertemu untuk membahas kenaikan tarif pajak hiburan
	<b>Kutipan Sumber</b>	Ni Luh Djelantik <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Sebagaimana diketahui, sekitar 60 persen dari ekonomi Bali bergantung pada sektor pariwisata. Kita perlu memahami bahwa tidak semua bisnis hiburan hanya ditujukan untuk segmen tertentu."</li> <li>2. "Mohon, sangat mohon. Tolong perjuangkan kami. Kunjungilah restoran, bar, beach club yang sekarang sepi. Datanglah ke Bali. Bersama saya, saya akan mengajak Anda berkeliling."</li> <li>3. "Jika Anda benar-benar peduli dengan rakyat, kami dengan jujur membayar pajak. Kami bekerja keras untuk membayar pajak dari penghasilan yang tidak selalu cukup. Jadi, harap dengarkan kami saat ini, karena jika rakyat sudah tidak puas, konsekuensinya akan berat."</li> <li>4. "Jika pajak diterapkan dengan tingkat yang sedemikian tinggi, secara otomatis mereka akan memindahkan dana mereka ke negara lain. Sebagai contoh, Thailand."</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini</b>	1. Ni Luh Djelantik menegaskan bahwa tidak semua orang yang mengunjungi tempat-tempat hiburan memiliki niat yang buruk. Beberapa juga datang hanya untuk menikmati atmosfer dan menghabiskan uang hasil kerja keras mereka untuk berlibur.
	<b>Penutup</b>	Artikel ditutup dengan penjelasan penulis terkait kutipan dari Ni Luh Djelantik
	Struktur Skrip	<b>What</b>
<b>Where</b>		Denpasar
<b>When</b>		22 Januari 2024
<b>Who</b>		Ni Luh Djelantik
<b>Why</b>		Pengusaha tidak membutuhkan insentif yang diberikan oleh pemerintah.
	<b>How</b>	Ni Luh Djelantik menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak tepat, karena kebanyakan pengunjung datang berlibur bukan untuk niat yang tidak baik dan meminta pemerintah belajar dari negara Thailand dari segi kebijakan.

<b>Struktur Tematik</b>	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Dalam artikel ini tiap paragraf menginformasikan Ni Luh Djelantik meminta Sri Mulyani Selaku Menkeu untuk mendatangi tempat wisata di Bali untuk melihat langsung bagaimana dunia bisnis hiburan dan mendengarkan keluhan Masyarakat.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat foto screenshot Sandiaga Uno dalam acara Indonesia Maju Bersama Parekraf Hijau, yang membahas tentang kenaikan pajak hiburan . Selain itu, dalam artikel ini terdapat kata frasa asing “ <i>please fight for us</i> ” artinya yakni “tolong berjuang untuk kami” penulis ingin menonjolkan bahwa pelaku usaha sangat membutuhkan wisatawan agar mendatangi bar, rumah makan, beach club, dll yang saat ini sudah mati suri.

*Sumber: Olahan Peneliti*

## Rincian Analisis

### a. Struktur Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis, wartawan ingin menginformasikan Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan pertemuan di Bali dengan para pengusaha di industri spa dan hiburan. Ini dilakukan sebagai respons terhadap kenaikan tarif pajak untuk beberapa bisnis hiburan menjadi 40-75%. Sri Mulyani diundang ke Bali untuk mendengarkan langsung keluhan dari masyarakat. hal itu selaras dengan *lead* dan latar informasi dalam artikel. Penulis dalam artikel mencantumkan sumber dari pihak terkait, yaitu Ni Luh Djelantik selaku pengusaha bali di sektor hiburan. Artikel tersebut ditutup dengan penjelasan kutipan atau penambahan informasi terkait pernyataan dari Ni Luh Djelantik.

### b. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yaitu Ni Luh Putu Ary meminta Menkeu Sri Mulyani memantau kegiatan pengusaha di sektor hiburan. Selanjutnya *where* dan *when* yaitu Denpasar, 22 Januari 2024. Lalu, *who* dan *why* yaitu Ni Luh Djelantik , serta para pengusaha sektor hiburan tidak membutuhkan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Dan *how* yaitu Ni Luh Djelantik menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak tepat, karena kebanyakan pengunjung dating berlibur bukan untuk niat yang tidak baik dan meminta pemerintah belajar dari negara Thailand dari segi kebijakan.

### c. Struktur Tematik

Berdasarkan struktur tematik dalam artikel secara keseluruhan dari awal paragraf hingga paragraf penutup memiliki keterkaitan bagaimana penulis menginformasikan Ni Luh Djelantik meminta Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu) untuk mendatangi tempat wisata di Bali untuk melihat langsung bagaimana dunia bisnis hiburan dan mendengarkan keluhan Masyarakat. Kemudian Ni Luh Djelantik juga meminta Sri Mulyani mendorong dan mendengarkan masukan-masukan dari rakyat. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah tidak dibutuhkan, karena Masyarakat membutuhkan peraturan atau kebijakan yang tepat.

### d. Struktur Retoris

Berdasarkan struktur retoris, artikel ini memuat foto screenshot Sandiaga Uno dalam acara Indonesia Maju Bersama Parekraf Hijau, yang membahas tentang kenaikan pajak hiburan. Selain itu, dalam artikel ini terdapat kata frasa asing “*please fight for us*” artinya yakni “tolong berjuang untuk kami” penulis ingin menonjolkan bahwa pelaku usaha sangat membutuhkan wisatawan agar mendatangi bar, rumah makan, beach club, dll yang saat ini sudah mati suri.

## 18. Analisis Artikel Berita 18

**Judul** : Pajak Hiburan 40-75% Diprotes, Airlangga: Tak Mutlak, Tergantung Daerah

**Sumber** : Detik.com

**Tanggal** : 15 Januari 2024

**Ringkasan** : Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai kenaikan Pajak Bea Masuk (PBJT). Airlangga mengungkapkan hal ini setelah menyalurkan bantuan pangan di kantor Perum Bulog Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat, NTT. Dia menyatakan bahwa tempat-tempat

wisata seperti Mandalika di Bali dan Labuan Bajo juga mengalami keluhan serupa terkait pajak yang mencapai 40%.

Tabel 4.18. Analisis Artikel Berita 18

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
<b>Struktur Sintaksis</b>	<b>Judul</b>	Pajak Hiburan 40-75% Diprotes, Airlangga: Tak Mutlak, Tergantung Daerah
	<b>Lead</b>	Pemerintah telah menetapkan peningkatan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk layanan hiburan, dengan kisaran antara 40% hingga maksimal 75%. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai kenaikan tersebut.
	<b>Latar Informasi</b>	Pemerintah telah menetapkan kenaikan pajak hiburan sebesar 40%-75%, hal tersebut diungkapkan oleh Airlangga Hartarto
	<b>Kutipan Sumber Pernyataan Opini Penutup</b>	Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) 1. Airlangga berpendapat bahwa peningkatan pajak sebesar 40-75% bagi penyedia layanan hiburan bisa dikecualikan.
		Artikel ditutup dengan kutipan dari Hotman paris pada Instagram pribadinya
<b>Struktur Skrip</b>	<b>What</b>	Pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan pajak hiburan
	<b>Where</b>	Manggarai Barat
	<b>When</b>	15 Januari 2024
	<b>Who</b>	Airlangga Hartarto
	<b>Why</b>	Airlangga mengatakan terkait kenaikan pajak hiburan yang telah ditetapkan aka nada revisi dalam UU HKPD
<b>Struktur Tematik</b>	<b>How</b>	Penetapan kebijakan kenaikan pajak menimbulkan konflik dan ramai dibicarakan Masyarakat khususnya para pelaku usaha hiburan yang terkena imbas, dan kebijakan tersebut juga mengancam kelangsungan industri pariwisata Indonesia walaupun masih bisa revisi.
	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	Dalam artikel ini dari paragraf awal hingga akhir menginformasikan terkait penetapan kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75% yang menimbulkan konflik di berbagai kalangan, hingga protes dari pengacara kondang sekaligus pengusaha di sektor hiburan Hotman Paris. Kemudian menurut Airlangga Hartarto penetapan kebijakan tersebut masih bisa berubah atau direvisi.
	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Terdapat kata frasa asing yakni “ <i>local wisdom</i> ” yang dimaksud yaitu kearifan setempat, dalam artikel ini juga terdapat kata yang ditebalkan oleh penulis yakni kata “Airlangga Hartarto” dan “detikcom” yang bermaksud pada artikel detikcom memiliki data berupa catatan besaran pajak hiburan yang diinformasikan oleh Airlangga Hartarto. Selain itu juga terdapat foto Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian yang sedang di wawancara oleh wartawan media.
<b>Struktur Retoris</b>		

Sumber: Olahan Peneliti

## Rincian Analisis

### a. Struktur Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis, wartawan ingin menginformasikan terkait Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai kenaikan Pajak Bea Masuk

(PBJT). Pemerintah telah menetapkan peningkatan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk layanan hiburan, dengan kisaran antara 40% hingga maksimal 75%. Airlangga Hartarto menyatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai kenaikan tersebut.

#### **b. Struktur Skrip**

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yaitu Pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan pajak hiburan. Selanjutnya *where* dan *when* yaitu Jakarta, 15 Januari 2024. Lalu, *who* yaitu Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian, dan *why* Airlangga mengatakan terkait kenaikan pajak hiburan yang telah ditetapkan aka nada revisi dalam UU HKPD. Kemudian unsur *how* yakni dalam artikel ini dari paragraph awal hingga akhir menginformasikan terkait penetapan kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75% yang menimbulkan konflik di berbagai kalangan, hingga protes dari pengacara kondang sekaligus pengusaha di sektor hiburan Hotman Paris. Kemudian menurut Airlangga Hartarto penetapan kebijakan tersebut masih bisa berubah atau direvisi.

#### **c. Struktur Tematik**

Berdasarkan struktur tematik dalam artikel secara keseluruhan dari awal paragraf hingga paragraf penutup memiliki keterkaitan bagaimana penulis menginformasikan pernyataan dari Airlangga Hartarto terkait penetapan kenaikan pajak hiburan dan juga kebijakan tersebut dapat dilakukan revisi atau perubahan.

#### **d. Struktur Retoris**

Berdasarkan struktur retoris, artikel ini terdapat kata frasa asing yakni “*local wisdom*” yang dimaksud yaitu kearifan setempat, dalam artikel ini juga terdapat kata yang ditebalkan oleh penulis yakni kata “Airlangga Hartarto” dan “detikcom” yang bermaksud pada artikel detikcom memiliki data berupa catatan besaran pajak hiburan yang diinformasikan oleh Airlangga

Hartarto. Selain itu juga terdapat foto Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian yang sedang di wawancara oleh wartawan media.

#### 19. Analisis Artikel Berita 19

**Judul** : Pajak Hiburan 40-75%, Pengamat Bicara Potensi PHK

**Sumber** : Detik.com

**Tanggal** : 15 Januari 2024

**Ringkasan** : Keputusan untuk meningkatkan tarif pajak hiburan menjadi 40-75% mulai Januari 2024 menuai kritik dari beberapa tokoh industri hiburan, termasuk pengacara terkenal Hotman Paris dan pedangdut terkemuka Inul Daratista. Ekonom dari Institute for Development Economics and Finance, Nailul Huda, menyatakan bahwa tingkat pajak yang tinggi tersebut kemungkinan besar akan menimbulkan protes dari sebagian besar pelaku usaha di industri hiburan.

Tabel 4.19. Analisis Artikel Berita 19

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
<b>Struktur Sintaksis</b>	<b>Judul</b>	Pajak Hiburan 40-75%, Pengamat Bicara Potensi PHK
	<b>Lead</b>	Mulai Januari 2024, tarif pajak hiburan telah ditingkatkan menjadi 40-75%. Langkah ini telah menarik kritik dari sejumlah pelaku bisnis di industri hiburan, termasuk tokoh seperti pengacara terkenal Hotman Paris dan pedangdut ternama Inul Daratista.
	<b>Latar Informasi</b>	Penetapan pajak hiburan 40-75% menimbulkan kritik dari para pelaku bisnis hiburan
	<b>Kutipan Sumber</b>	Nailul Huda (INDEF) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Pemilik tempat hiburan pasti akan menentang peningkatan tersebut. Perlu untuk secara teratur meninjau dan mengevaluasi besaran pajak tersebut, dengan evaluasi dilakukan setiap tiga bulan."</li> <li>2. "Pasti akan menghasilkan dampak yang signifikan jika tarif pajak hiburan dinaikkan hingga 75%. Terutama dengan meningkatnya aktivitas masyarakat setelah pembukaan kegiatan, permintaan akan hiburan juga akan meningkat seiringnya. Masyarakat sudah sangat antusias untuk menikmati hiburan, sehingga permintaan diprediksi akan meningkat cukup besar."</li> <li>3. "Potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pasti ada, bergantung pada seberapa besar penurunan permintaan. Saya percaya bahwa beberapa sektor akan terdampak cukup signifikan, meskipun ada sektor lain yang dampaknya mungkin lebih terbatas."</li> </ol> <p>Prianto Budi Saptono (Direktur Eksekutif Pratama-Kreston TRI)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Tarif pajak sebesar 40%-75% merupakan hasil keputusan politik antara DPR dan Pemerintah pusat sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945. Oleh karena itu, rentang tarif tersebut dianggap sesuai secara politis karena</li> </ol>

		Undang-Undang tentang Hak Kekayaan dan Pajak Daerah (UU HKPD) merupakan hasil dari kompromi politik antara eksekutif dan legislatif, yang mewakili suara rakyat."
<b>Struktur Skrip</b>	<b>Pernyataan Opini</b>	1. Nailul berpendapat bahwa dampak tersebut kemungkinan akan terbatas pada permintaan saja. Ini karena konsumsi seperti hiburan diperkirakan akan meningkat sejalan dengan pembukaan aktivitas masyarakat.
	<b>Penutup</b>	Artikel ditutup dengan kutipan dari Prianto Budi selaku Direktur TRI, terkait penetapan tarif pajak 40-75% dianggap sudah tepat. Penetapan tarif pajak hiburan menjadi 40-75% mulai Januari 2024
<b>Struktur Tematik</b>	<b>What</b>	Jakarta
	<b>Where</b>	15 Januari 2024
	<b>When</b>	Nailul Huda dan Prianto Budi Saptono
	<b>Who</b>	Kenaikan tarif hiburan menimbulkan tanggapan dari para pengamat.
	<b>Why</b>	Nailul menyatakan dengan adanya kenaikan tarif hiburan maka para pengelola objek hiburan akan keberatan dan berujung PHK. Pada awal paragraf berita membahas tentang penjelasan keputusan penetapan tarif hiburan pada Januari 2024 yang menimbulkan kritik salah satunya pengacara kondang Hotman Paris dan Pedangdut Inul Daratista. Kemudian paragraf selanjutnya Nailul menyatakan dengan adanya kenaikan tarif tersebut akan berdampak PHK.
<b>Struktur Retoris</b>	<b>How</b>	Pada artikel ini hanya terdapat foto ilustrasi pajak yang menggambarkan "tax" yang bermaksud pajak.
	<b>Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat</b>	
	<b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	

Sumber: *Olahan Peneliti*

## Rincian Analisis

### a. Struktur Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis, wartawan ingin menginformasikan respon terhadap keputusan untuk meningkatkan tarif pajak hiburan menjadi 40-75% pada Januari 2024 mendapat kritik dari sejumlah tokoh industri hiburan, termasuk pengacara terkenal Hotman Paris dan pedangdut terkemuka Inul Daratista. Kemudian Nailul Huda, selaku ekonom dari Institute for Development Economics and Finance, menyatakan bahwa tarif pajak yang tinggi tersebut kemungkinan besar akan menimbulkan protes dari mayoritas pelaku usaha di industri hiburan. hal itu selaras dengan *lead* dan latar informasi dalam artikel. Penulis dalam artikel mencantumkan sumber dari pihak terkait, yaitu Nailul Huda dan Prianto Budi Saptono. Melalui elemen-elemen pada struktur sintaksis, penulis berfokus menginformasikan sektor mana saja yang terkena dampak kenaikan tarif pajak hiburan.

### **b. Struktur Skrip**

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yaitu penetapan tarif pajak hiburan menjadi 40-75% mulai Januari 2024. Selanjutnya *where* dan *when* yaitu Jakarta, 15 Januari 2024. Lalu, *who* dan *why* yaitu Nailul Huda dan Prianto Budi Saptono, terkait kenaikan tarif hiburan menimbulkan tanggapan dari para pengamat. Dan *how* yaitu Nailul menyatakan dengan adanya kenaikan tarif hiburan maka para pengelola objek hiburan akan keberatan dan berujung PHK.

### **c. Struktur Tematik**

Berdasarkan struktur tematik dalam artikel secara keseluruhan dari awal paragraf hingga paragraf penutup memiliki keterkaitan bagaimana Nailul Huda dan Prianto Budi Saptono menyatakan tanggapan dan informasi penting terkait dampak dan informasi hasil Keputusan Pemerintah pusat dan DPR yang merupakan hasil kompromi politik antara legislatif dan eksekutif.

### **d. Struktur Retoris**

Pada artikel ini hanya terdapat foto ilustrasi pajak yang menggambarkan “tax” yang bermaksud pajak, karena artikel tersebut membahas kebijakan kenaikan pajak hiburan.

## **20. Analisis Artikel Berita 20**

**Judul** : Heru Budi Bakal Bahas Ulang soal Perda Kenaikan Pajak Hiburan 40 Persen

**Sumber** : Detik.com

**Tanggal** :17 Januari 2024

**Ringkasan** : Heru Budi Hartono, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, telah memberikan komentarnya mengenai rencana kenaikan pajak hiburan sebesar 40% mulai tahun 2024. Dia menyatakan bahwa rencana ini akan dibahas bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi

Marsudi, menyatakan kekhawatirannya bahwa aturan tersebut dapat menyebabkan pengusaha hiburan mengalami kerugian besar. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu untuk menyesuaikan pajak tersebut.

Tabel 4.20. Analisis Artikel Berita 20

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<b>Judul</b>	Heru Budi Bakal Bahas Ulang soal Perda Kenaikan Pajak Hiburan 40 Persen
	<b>Lead</b>	Heru Budi Hartono, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sementara DKI Jakarta, telah mengomentari rencana kenaikan pajak hiburan sebesar 40% yang akan diberlakukan mulai tahun 2024. Dia menyatakan niatnya untuk melakukan evaluasi ulang terkait peraturan tersebut.
	<b>Latar Informasi</b>	Heru Budi angkat suara terkait kenaikan pajak hiburan 40% yang harus dikaji ulang.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Heru Budi Hartono (Gubernur DKI Jakarta) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Oh ya kami akan bahas lagi”</li> <li>2. “Kita akan bahas Bersama DPRD”</li> </ol> Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI Jakarta) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Jika tarif pajak hiburan naik menjadi 40 persen, akan ada dampak yang sangat merugikan. Tempat hiburan akan ditutup, banyak yang kehilangan pekerjaan. Jika semua pengusaha dikenai pajak sebesar 40 persen, bisnis mereka akan gulung tikar”.</li> <li>2. “Saya berpikir seperti ini, dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022, memang diatur bahwa tarif pajak naik hingga 40 persen saat ini. Namun, pertanyaannya adalah, pemerintah harus mempertimbangkan bahwa setiap daerah memiliki keadaan yang berbeda, seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Surabaya. Oleh karena itu, perlu untuk dievaluasi ulang”.</li> <li>3. Harapannya adalah agar keputusan yang diambil tidak sewenang-wenang, dengan menaikkan tarif tanpa pertimbangan. Akhirnya, ini bisa menyebabkan tempat-tempat hiburan atau pengusaha merugi, dan kami tidak ingin membela kebijakan yang merugikan industri hiburan. Sebagai pemimpin Dewan, saya berharap pemerintah daerah dapat bijaksana dalam membuat keputusan tersebut dengan mempertimbangkan demografi setiap wilayah. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan koreksi yang sesuai dengan keadaan yang ada.</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini</b>	1. Prasetyo berpendapat bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya mempertimbangkan semua kemungkinan sebelum membuat atau mengambil keputusan terkait kebijakan di wilayah tersebut.
	<b>Penutup</b>	Artikel ditutup dengan kutipan dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi yang menyatakan
Struktur Skrip	<b>What</b>	Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menanggapi terkait kenaikan pajak hiburan hingga 40 persen mulai 2024.
	<b>Where</b>	Jakarta
	<b>When</b>	17 Januari 2024
	<b>Who</b>	Heru Budi Hartono dan Prasetyo Edi Marsudi
	<b>Why</b>	Prasetyo mengatakan kenaikan pajak hiburan tersebut mengakibatkan pariwisata terpaksa tutup.
	<b>How</b>	Pemprov DKI Jakarta harus mempertimbangkan dalam memutuskan suatu kebijakan pada suatu daerah agar tidak mengakibatkan kerugian atau berdampak bagi Masyarakat.
Struktur Tematik	<b>Paragraf, proposisi</b>	Pada awal paragraf berita membahas tentang rencana adanya kebijakan kenaikan pajak hiburan yang dibahas bersama

Struktur Retoris	<b>kalimat, hubungan antar kalimat</b>  <b>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</b>	Bapenda Provinsi DKI Jakarta dan juga DPRD DKI Jakarta. Paragraf selanjutnya membahas terkait kebijakan yang masih bisa dikaji ulang atau dirubah agar meminimalisir dampak negatif bagi berbagai sektor. Terdapat unsur koherensi kata “ia” yang dimaksud Heru Budi Hartanto. Selain unsur kata terdapat unsur gambar yakni foto Heru Budi Hartanto yang menggambarkan sedang diwawancara oleh wartawan.
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Sumber: Olahan Peneliti*

## Rincian Analisis

### a. Struktur Sintaksis

Berdasarkan struktur sintaksis, wartawan ingin menginformasikan Heru Budi Hartono, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, telah memberikan tanggapannya mengenai rencana kenaikan pajak hiburan sebesar 40% yang akan dimulai pada tahun 2024. Dia menyatakan bahwa rencana tersebut akan diselidiki bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menyatakan kekhawatirannya bahwa kebijakan tersebut dapat menyebabkan kerugian besar bagi pengusaha hiburan, hal itu selaras dengan *lead* dan latar informasi dalam artikel. Penulis dalam artikel mencantumkan sumber dari pihak terkait, yaitu Heru Budi Hartanto dan Prasetyo Edi Marsudi. Melalui kutipan sumber, penulis dapat memberikan informasi secara seimbang. Artikel tersebut ditutup dengan kutipan pernyataan dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi. Melalui elemen-elemen pada struktur sintaksis, penulis berfokus pada akibat adanya kenaikan pajak hiburan, sektor hiburan terpaksa menutup tempat hiburan serta adanya PHK.

### b. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, dalam artikel memuat unsur 5W+1H secara lengkap, unsur *what* yaitu Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menanggapi terkait kenaikan pajak hiburan hingga 40 persen mulai 2024. Selanjutnya *where* dan *when* yaitu Jakarta, 17 Januari 2024. Lalu, *who* dan *why* yaitu Heru Budi Hartanto dan Prasetyo Edi Marsudi mengatakan kenaikan pajak hiburan tersebut mengakibatkan pariwisata terpaksa tutup. Dan *how* yaitu Pemprov DKI Jakarta harus mempertimbangkan dalam memutuskan suatu

kebijakan pada suatu daerah agar tidak mengakibatkan kerugian atau berdampak bagi Masyarakat.

**c. Struktur Tematik**

Berdasarkan struktur tematik, dalam artikel secara keseluruhan dari awal paragraf hingga paragraf penutup memiliki keterkaitan bagaimana berita membahas tentang rencana adanya kebijakan kenaikan pajak hiburan yang dibahas bersama Bapenda Provinsi DKI Jakarta dan juga DPRD DKI Jakarta. Kemudian paragraf selanjutnya membahas terkait kebijakan yang masih bisa dikaji ulang atau dirubah agar meminimalisir dampak negatif bagi berbagai sektor.

**d. Struktur Retoris**

Berdasarkan struktur retoris, artikel ini terdapat unsur koherensi kata “ia” yang dimaksud Heru Budi Hartanto. Selain unsur kata terdapat unsur gambar yakni foto Heru Budi Hartanto yang menggambarkan sedang diwawancara oleh wartawan.

**4.3. Hasil Analisis Framing Pemberitaan Isu Kenaikan Pajak Hiburan Di Indonesia pada Media Online Bisnis.com dan Detik.com**

Pada hasil analisis penelitian menggunakan kerangka analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki menunjukkan adanya perbedaan pada pembedaan berita kenaikan pajak hiburan di media online Bisnis.com dan Detik.com periode 5 Januari – 31 Maret 2024 yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.21. Perbandingan Pemberitaan Isu Kenaikan Pajak Hiburan Di Indonesia Pada Media Online Bisnis.com dan Detik.com

Perangkat Framing	Bisnis.com	Detik.com
Sintaksis	<ol style="list-style-type: none"> <li>Judul menggunakan kutipan narasumber, yang bersifat pernyataan dari pelaku usaha dan ekonom Indonesia.</li> <li>Lead bersifat singkat atau <i>to the point</i> terkait kenaikan pajak hiburan.</li> <li>Terdapat beberapa kutipan dari narasumber dan juga terdapat kutipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemilihan kata judul berita bersifat lugas dan kontra sehingga membuat pembaca tertarik membaca isi artikel tersebut</li> <li>Lead bersifat deskriptif atau menggambarkan kontra dari</li> </ol>

	yang diambil dari akun pribadi narasumber, yang bersifat pernyataan informatif	kebijakan kenaikan pajak hiburan.
	4. Penutup berita bersifat kutipan dari narasumber	3. Terdapat beberapa kutipan narasumber dan pernyataan bersifat kontra
	<b>Pelaku usaha</b>	4. Penutup berisi informasi tambahan dan kutipan pernyataan dari narasumber
	1. Hotman Paris	<b>Pelaku usaha</b>
	2. Inul Daratista	1. Hotman Paris
	3. Suryawijaya	2. Inul Daratista
	4. Efrat Tio	3. Deddy Pranowo Eryono
	5. Ni Luh Djelantik	4. Suryawijaya
	<b>Menteri</b>	5. Ni Luh Djelantik
	1. Sandiaga Uno	<b>Menteri</b>
	2. Luhut Binsar Pandjaitan	1. Sandiaga Uno
	<b>Presiden</b>	2. Sri Mulyani
	1. Presiden Republik Indonesia Jokowi	3. Luhut Binsar Pandjaitan
	<b>Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia</b>	<b>Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia</b>
	1. Hariyadi Sukamdani	1. Hariyadi Sukamdani
	<b>Gubernur</b>	<b>Pengamat (ekonom)</b>
	1. Heru Budi Hartono	1. Airlangga Hartarto
	<b>Pengamat</b>	2. Nailul Huda
	1. Airlangga Hartarto	
	<b>Pakar</b>	
	1. Taufan Rahmadi	
<b>Skrip</b>	1. Berita memuat 5W+1H yang menonjolkan unsur <i>what</i> yang berupa respons dari adanya pemberitaan terkait kebijakan kenaikan pajak hiburan	1. Berita memuat 5W+1H yang menonjolkan unsur <i>what</i> berisi terkait informasi sesuai dengan headline dan lebih deskriptif
<b>Tematik</b>	1. Berita yang disusun memberikan informasi yang jelas dan berfokus pada kebijakan kenaikan pajak hiburan	1. Artikel berita bersifat membahas perihal kontra dari para pelaku usaha
<b>Retoris</b>	1. Penulis menggunakan penebalan kata guna menonjolkan suatu makna atau pembahasan terkait isi artikel.	1. Penulis menggunakan penebalan kata guna menonjolkan suatu makna atau pembahasan terkait isi artikel.
	2. Penulis menggunakan kata frasa hukum, frasa daerah, dan frasa asing seperti “ <i>judicial review</i> ”, “ <i>modyar tah!!!!</i> ”, dan “ <i>please fight for us</i> ”	2. Penulis menggunakan kata frasa hukum seperti “ <i>judicial review</i> ”
	3. Penulis menggunakan gambar yang berbeda – beda pada setiap artikel yang dikeluarkan. Gambar atau foto yang digunakan, pada tempat wisata menggunakan gambar ilustrasi seperti club, tempat perawatan kecantikan/spa, sedangkan foto asli digunakan seperti foto sedang wawancara atau konferensi pers	3. Penulis menggunakan gambar yang berbeda – beda pada setiap artikel yang dikeluarkan.
	4. Tidak terlalu menggunakan kata idiom	4. Penggunaan gambar relevan dengan judul. Dalam 4 artikel detik.com terdapat informasi tambahan berupa video Dimana menjelaskan isi dari artikel, dan terdapat gambar ilustrasi yang menggambarkan ilustrasi pajak bertuliskan “tax” dan terdapat foto screenshot acara “ <i>The Weekly Brief with Sandiaga Uno</i> ” terkait kenaikan pajak hiburan
		5. Tidak terlalu menggunakan kata idiom

Sumber: Olahan Peneliti.

Pada tabel analisis diatas ditemukan beberapa perbedaan pada portal media online Bisnis.com dan Detik.com dalam membingkai berita berkenaan kebijakan kenaikan pajak hiburan. Dengan memakai metode framing yang dikembangkan oleh Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki, penelitian ini membandingkan dan membedakan artikel berita yang dimuat di Bisnis.com dan Detik.com tentang kenaikan pajak hiburan. Mekanisme framing ini digunakan untuk menganalisis sepuluh berita yang diterbitkan masing-masing dua media online.

Dari segi struktur sintaksis, terdapat perbedaan dalam pemberitaan kedua situs berita tersebut mengenai peran Jokowi dalam kebijakan kenaikan pajak hiburan. Perbedaan pertama yakni Bisnis.com menggunakan kutipan narasumber, yang bersifat pernyataan dari pelaku usaha dan ekonom Indonesia terlihat dalam judul berita “Bahas Pajak Hiburan, Hotman dan Inul Sambangi Markas Airlangga Hartarto” dan “Heru Budi Cari Jalan Tengah Polemik Pajak Hiburan 40% di Jakarta”. Bahkan Bisnis.com memilih kutipan judul berdasarkan pertimbangan cermat dan matang dari pemerintah, terlihat dalam judul berita “Jokowi Mau Kasih Insentif PPh pada Badan Jasa Hiburan 10%, GIPI: Tak Menarik”. Sedangkan, media *online* Detik.com pada bagian Pemilihan kata judul berita bersifat lugas dan menentang sehingga membuat pembaca tertarik membaca isi artikel tersebut, terlihat pada judul berita “Pajak Hiburan 40-75%, Sandiaga: WA dan DM Saya Meledak!” dan “PHRI DIY Sindir Kenaikan Pajak Hiburan: Kenapa Nggak 100% Sekalian?”.

Kemudian, pada lead menunjukkan media *online* Bisnis.com dalam penggunaan kata sedikit lebih singkat dan padat, dibandingkan media Detik.com lebih menggunakan jabaran kalimat yang lebih banyak pada unsur lead dengan maksud ingin memberikan informasi yang lebih mendalam dan akurat. Perbandingan tersebut dapat terlihat dari Bisnis.com yang hanya terdapat 1 (satu) kalimat pada bagian lead, dibanding Detik.com yang bisa hingga 2 (dua) kalimat dalam penulisan lead pemberitaan.

Pada kutipan Bisnis.com, terdapat beberapa kutipan dari narasumber dan juga kutipan yang diambil dari akun pribadi narasumber seperti “Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku industri pariwisata dan

kebudayaan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan kami komitmen untuk menjaga keberlanjutan industri yang sedang berkembang ini. Terima kasih kepada Mbak @inul.d dan semua yang telah menyampaikan aspirasinya”. Sedangkan Detik.com didominasi oleh kutipan pernyataan dari narasumber yang bersifat konflik seperti “Ini yang membuat WA saya dan DM saya meledak! Menerima laporan, dari Bang Hotman dan Mbak Inul” dan “Mengapa hanya 40 - 75 persen? Nggak sekalian 100 % saja? Kan lebih baik 100 % biar kita pelaku pariwisata mati sekalian”. Selain itu, perbedaan dari kutipan sumber juga terlihat dari narasumber yang digunakan pada masing-masing artikel. Pada Bisnis.com narasumber didominasi pelaku usaha, bagian pemerintahan, bahkan ekonom Indonesia. Sedangkan Detik.com lebih didominasi oleh para pelaku usaha dan pemerintahan.

Pada struktur skrip dalam pemberitaan di kedua media *online* juga ditemukan perbedaan dari berita yang dianalisis. Pada portal media *online* Bisnis.com lebih menonjolkan unsur *what* seperti pernyataan dari Sandiaga Uno terkait bagaimana cara mengorkestrasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2024 atau bagaimana caranya agar para pelaku usaha hiburan tetap merasakan kesejahteraan dan terus menciptakan lapangan pekerjaan. Sedangkan media *online* Detik.com lebih menonjolkan unsur *what* terkait informasi sesuai dengan headline dan lebih deskriptif, namun pada penjabarannya atau isi artikel menunjukkan unsur lain seperti pernyataan *why* seperti pernyataan protes dari para pelaku usaha hiburan dan harapan agar kebijakan tersebut dievaluasi kembali atau dilakukan Pemeriksaan terhadap keabsahan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui serangkaian prosedur uji konstitusionalitas.

Pada struktur tematik, Bisnis.com dalam berita yang disusun memberikan informasi yang jelas dan berfokus pada kebijakan kenaikan pajak hiburan, yakni menginformasikan proses penetapan hingga evaluasi ulang terkait kebijakan kenaikan pajak hiburan tersebut. Sedangkan Detik.com isi artikel berita cenderung membahas perihal pernyataan menentang dari para pelaku usaha hiburan, yakni menginformasi pernyataan yang bersifat konflik atau protes dari pelaku usaha hiburan.

Pada struktur retorik terdapat perbedaan pada kedua portal media online Bisnis.com dan Detik.com ditemukan dalam pemberitaan yang dibingkai. Pada media *online* Bisnis.com Bahasa yang digunakan dalam membingkai isu kenaikan pajak hiburan lebih singkat, padat. Sedangkan media *online* Detik.com lebih deskriptif dan informatif dalam memaparkan isu kenaikan pajak hiburan. Selanjutnya perbedaan yang ditemukan antara dua media online ini adalah pada penggunaan gambar atau foto dalam pemberitaan. Dimana Bisnis.com lebih banyak menggunakan gambar atau foto ilustrasi untuk menggambarkan isi pemberitaan seperti ilustrasi foto hiburan malam, perawatan kecantikan, dan tempat wisata lainnya. Sedangkan Detik.com menggunakan gambar atau foto yang berbeda-beda untuk menggambarkan isi pemberitaan seperti foto rombongan Inul dan Hotman, Menparekraf Sandiaga saat konferensi pers, Airlangga Hartarto saat diwawancara, hingga foto Menko Marves Luhut Pandjaitan. Selanjutnya yaitu penggunaan idiom dimana Bisnis.com dan Detik.com tidak terlalu sering menggunakan kata idiom. Adapun beberapa kata singkatan yang digunakan kedua media online tersebut seperti (UNWTO : United Nation World Tourism Organization), (SE : Surat Edaran), (PPH : Pajak Penghasilan), (DTP : Ditanggung Pemerintah, HKPD, dan (PERDA.

#### **4.4. Diskusi Teoritik**

Pada pembedaan pemberitaan isu kenaikan pajak hiburan pada media *online* Bisnis.com dan Detik.com seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kedua media tersebut memiliki bingkai berita yang berbeda berdasarkan analisis pada tiap berita. Perbedaan itu terlihat pada cara kedua media dalam membingkai berita kenaikan pajak hiburan. Pada Bisnis.com membingkai berita secara fakta yang bersifat informatif, menggunakan kata kiasan seperti frasa hukum, daerah, dan asing, dan dengan narasumber dari ekonom, pemerintah, dan pelaku usaha seperti Presiden, para menteri, gubernur, pengamat (ekonom), serta pakar. Bisnis.com lebih berfokus pada unsur *what* yang bersifat respons dari adanya pemberitaan kebijakan kenaikan pajak hiburan secara singkat, padat dan menginformasikan bagaimana kebijakan tersebut diproses. Dalam pembedaan beritanya, Bisnis.com

menyajikan tanggapan serta pernyataan dari tokoh penting dan berpengaruh. Sedangkan Detik.com berfokus pada pembingkai yang bersifat menentang, seperti tanggapan tidak sepakat dari para pelaku usaha hiburan dengan adanya kebijakan baru kenaikan pajak hiburan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Detik.com menyajikan lebih deskriptif dalam menginformasikan isi pemberitaannya terkait kebijakan kenaikan pajak hiburan.

Pada penelitian terdahulu, dengan judul “Analisa Framing Pemberitaan Kasus Suap Ditjen Pajak Pada Media *Online* Tempo.codanSuara.com” yang membahas kasus suap oleh Ditjen Pajak Pada Media *Online* Tempo.Co dan Suara.Com, sedangkan analisis ini membahas isu kenaikan pajak hiburan pada media *online* Bisnis.com dan Detik.com. analisis ini mempunyai perbedaan fokus dan media yang dianalisis. Pada penelitian sebelumnya, fokus pada kasus suap yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dan hanya menggunakan satu media. Sementara, penelitian ini memfokuskan pada isu kenaikan pajak hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah pada awal tahun 2024. Selanjutnya penelitian ini yang berjudul “Pembingkai Pemberitaan Isu Kenaikan Pajak Hiburan Di Indonesia Pada Media *Online* “Komparasi Framing Pan & Kosicki antara Media Bisnis.com dan Detik.com Periode 5 Januari - 31 Maret 2024”.

Seperti yang telah kita lihat dalam temuan, model analisa framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki mencakup 4 struktur: skrip, tematik, sintaksis, dan retorik. Bila dilihat dari konstruksi Realitas, kedua portal berita tersebut berusaha memberikan gambaran realitas bagi masyarakat. Kedua portal berita memiliki sudut pandangnya masing-masing untuk mengolah informasi. Bisnis.com menyajikan informasi secara singkat, padat dan bersifat “aman” dalam memberitakan isu kenaikan pajak hiburan, serta tanggapan atau imbauan dari narasumber terkait. Sedangkan Detik.com lebih bersifat “menentang” dalam membingkai berita isu kenaikan pajak hiburan dalam membuat headline atau judul, serta menekankan pernyataan terkait pernyataan menentang yang terjadi antara pemerintah yang telah menetapkan kebijakan kenaikan pajak hiburan tersebut dan pelaku usaha. Dalam hal ini konstruksi realitas sosial diartikan sebagai suatu proses sosial yang berlangsung untuk merepresentasikan realitas dan menentukan bagaimana realitas tersebut dipahami dan disajikan. Media massa juga mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap cara masyarakat memahami dan bereaksi terhadap berita (Universitas Bina Darma, 2018).

